

**EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) TAHUN 2014
(Studi Pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

Eka Tri Wahyuni

115030613111002



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MALANG

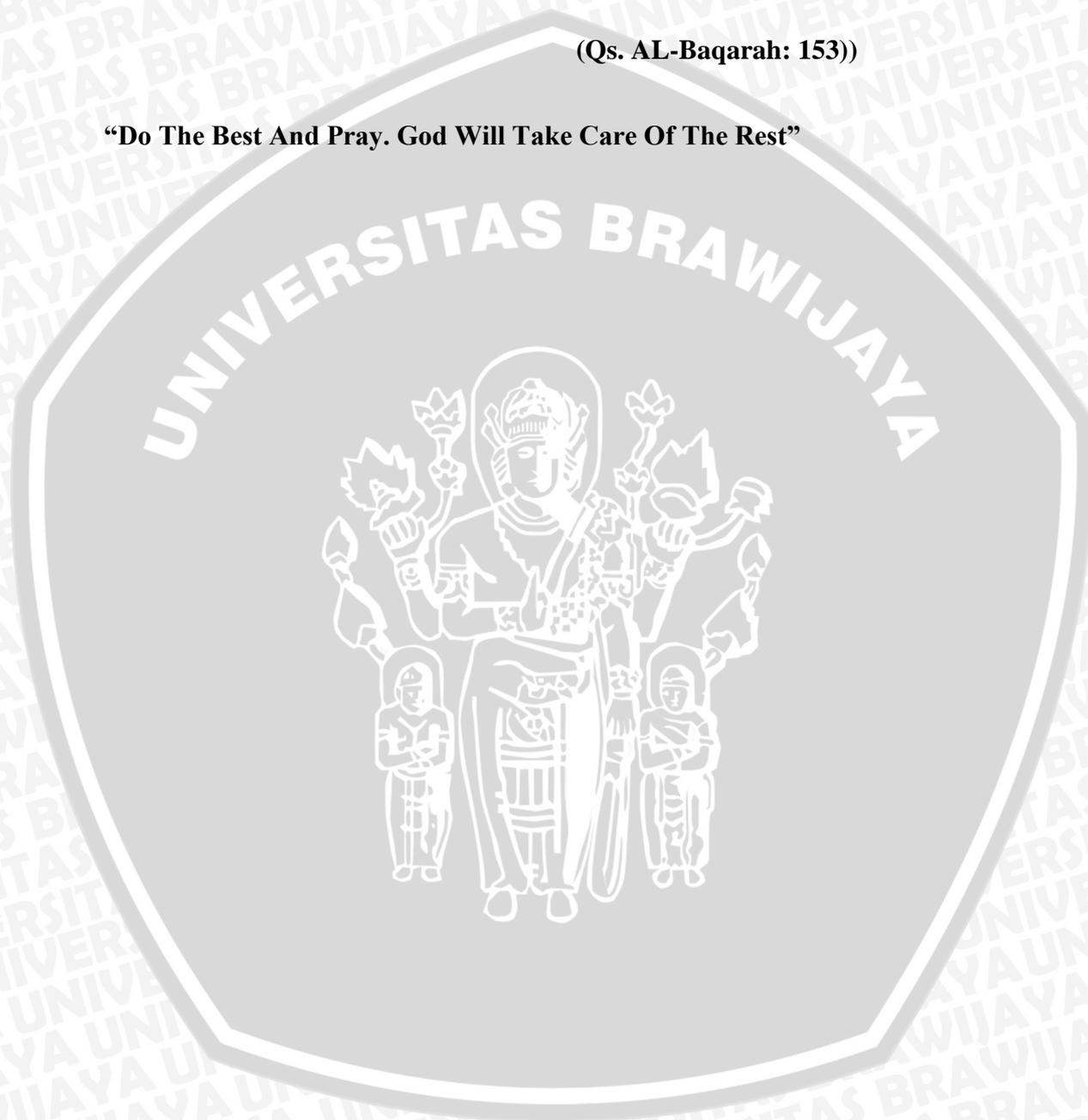
2015

MOTTO

“Hai Orang-Orang yang Beriman, Jadikanlah Sabar dan Shalatmu Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya ALLAH Beserta Orang-Orang yang Sabar”

(Qs. AL-Baqarah: 153)

“Do The Best And Pray. God Will Take Care Of The Rest”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)
TAHUN 2014 (Studi Pada Desa Tarokan, Kecamatan
Tarokan, Kabupaten Kediri)**

Disusun oleh : **EKA TRI WAHYUNI**

NIM : **115030613111002**

Fakultas : **ILMU ADMINISTRASI**

Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Minat : **PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Malang, 15 Oktober 2015

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Wima Yudho Prasetyo S.Sos, M.AP
NIP. 19790523 200604 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 November 2015
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi nama : Eka Tri Wahyuni
Judul : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014 (Studi pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota

Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP
NIP. 19790523 200604 1 002

Anggota

Dr. Endah Setyowati, M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

Anggota

Alfi Haris Wanto, MAP, MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 9 November 2015



Eka Tri Wahyuni
NIM. 115030613111002

RINGKASAN

Eka Tri Wahyuni, 2015, **Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014** (Studi di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri), Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Irwan Noor, M.A, Anggota : Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP. 151 Hal + XVI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis air yang terjadi di desa tarokan, kabupaten Kediri. Desa tarokan merupakan desa yang berada di lereng gunung wilis, sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada tahun 2014 desa tarokan mendapatkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Krisis air yang terjadi tidak hanya di desa tarokan, melainkan hal serupa juga dialami banyak desa di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan Kabupaten Kediri tersebut. bagaimana *Outcome* dan *Impact* dari Program PAMSIMAS di Desa Tarokan Kabupaten Kediri.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu Miles dan Huberman. Dengan fokus penelitian evaluasi program dengan melihat perbandingan antara *output* dengan rencana, melihat *outcome* dan *impact* yang terdiri dari dampak fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari segi evaluasi program dengan melihat kesesuaian antara rencana dengan *output* yang dihasilkan baik dari segi ketersediaan air, anggaran pembangunan, serta sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi banyak ketidaksesuaian terjadi, namun hal itu dikarenakan terdapat penambahan anggaran program dari masyarakat. Apabila dilihat dari manfaat atau *outcome* yang dihasilkan dari program pamsimas di desa tarokan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan jumlah pengguna air, memperluas jangkauan sarana, serta membiasakan hidup bersih dan sehat masyarakat. *Impact* yang dihasilkan dari program pamsimas tahun 2014 di desa tarokan cukup baik, baik dilihat dari dampak fisik/lingkungan, ekonomi, maupun sosial telah banyak perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah adanya program pamsimas, sehingga dapat disimpulkan bahwa program Pamsimas di desa tarokan berhasil.

Saran dari peneliti perlu adanya penggiliran anggota BPSPAM setiap dusun, perlu memperhitungkan debit air yang akan keluar setelah terjadi penambahan sumber baru, alangkah baiknya jika sosialisasi dilakukan pada seluruh masyarakat tidak hanya pada anggota BPSPAM saja, program pamsimas lebih baik memberi bantuan pipa sampai kerumah warga yang kurang mampu untuk membalik selang. Saran tersebut agar tercapainya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sesuai dengan tujuan program tersebut.

Kunci: Program Pamsimas, Evaluasi Program

SUMMARY

Eka Tri Wahyuni, 2015, **The Evaluation of Drinking Water Supply and Community-Based Sanitation Program (PAMSIMAS) 2014** (Study in Tarokan Village, Tarokan District, Kediri Regency), the Advisory Committee, Supervisor: Dr. Irwan Noor, MA, Co-Supervisor: Wima Yudo Prasetyo, S. Sos, M.AP. 151 Pages + xvi.

This research is motivated by the water crisis that occurred in the Tarokan Village, Kediri Regency. Tarokan Village is located at slope of Mount Willis. Its location makes people of society find difficulty to get clean water for daily necessity. In 2014, Tarokan was one of the villages in Indonesia which accepted the government's program, namely Drinking Water Supply and Community-Based Sanitation Program (PAMSIMAS). The water crisis was not occurred only in Tarokan, but also some villages in Indonesia. Thus, the scope of problems in this research is to determine and analyze the evaluation of Drinking Water Supply and Community-Based Sanitation Program (PAMSIMAS) in Tarokan Village, Kediri Regency, and the outcomes and impacts of PAMSIMAS in Tarokan Village, Kediri Regency.

The method used in this research is descriptive with qualitative approach. Data collection techniques which used are interviews, observation, and documentation. The analysis used Miles and Huberman's method of data analysis. The focuses in this research are comparison between outputs and planning documents of the program and determining outcomes and impacts which consisted physical, environmental, economic and social impacts.

Study resulted there are inappropriateness between outputs and the program planning which is shown by analysing water accessibility, development budget, and water supply and sanitation facilities, which occurred due to budget increase from society. Besides, the outcomes showed that PAMSIMAS in Tarokan Village are compatible with the expected goals in the planning documents: to increase the amount of clean water user, to expand the range of facilities, as well as to get used to live clean and healthy. The impacts of program are quite good. Either of the physical, environmental, economic or social impacts has been a lot of changes after the PAMSIMAS program. So it can be concluded that PAMSIMAS program in Tarokan Village has succeed.

The suggestions of this research are there are necessity to rotate the member of BPSPAM at every hamlet, to calculate the water debite which will flow after installing new resources, to conduct the communication to all of people in society. PAMSIMAS program in providing drinking water facilities for the poor was good, but it would be much better if the program provided not only to the top bath, but also the pipe to the poor users who could not afford the water pipe. Those suggestions are to achieve the compatible result between planning documents and implemented program of Drinking Water Supply and Community-Based Sanitation (PAMSIMAS).

Keyword: Pamsimas Program, Program Evaluation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan Rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014 (Studi di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri).”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dengan karya skripsi ini diharapkan akan menjadi salah satu acuan skripsi dalam mengevaluasi program penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca maupun pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, MSi selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan

4. Bapak Dr. Irwan Noor, MA dan Bapak Wima Yudho Prasetyo, S.Sos, MAP selaku komisi pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dengan sabar memberikan pengarahan serta dukungan dan juga banyak memberikan ilmunya mulai dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak / Ibu dosen serta staff pegawai di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Bapak / Ibu Perangkat Desa Tarokan, Bapak Sekertariat Pamsimas, serta Masyarakat Desa Tarokan yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini
7. Alm Bapak, Ibu, Alm Suamiku Tercinta Mas Zaiful Ghazi dan Kakak tercinta Mas amir dan Mas Agus yang senantiasa memberikan dukungan moril, do'a, motivasi, semangat yang tak pernah henti dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Serta keluarga besar penulis yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis
8. Nurul mak'e teman sekamar yang selalu memberikan semangat dan dukungan, Mbak Anggra, Mbak eny, Mbak Dewi, leni, sandy, nurul agustin, mamik, dewi dan mala selaku sahabat sejak SMP, SMA, KULIAH yang selalu ada memberikan semangat pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta kiki dan angger yang selalu ada waktu saat pengen cerita apapun termasuk skripsi ini, serta sahabat rumpik anis, sheella, anggun,

novi, risty, karima, ike, putri, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

10. Keluarga besar coklat semut Mas Andri, Bagus (Aa'), Miko, Nurul yang telah memberikan dukungan secara moril dan semangat pantang menyerah, serta seluruh keluarga besar kontrakan wisma mojokerto Indras (Iin), teza (Oppha), Reza (Bebob), Mikky (Adek), Ain (Honey) , Dani (Inad), Zamroni (Zambalado), Deri (Gembot) yang sudah menjadi keluarga kedua di kota rantau ini
11. Semua teman-teman Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 yang tak terasa telah empat tahun lebih kita bersama.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 Oktober 2015

Penulis

DENGAN RASA SYUKUR YANG MENDALAM SKRIPSI INI

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

>> **KEDUA ORANG TERCINTA ALM. BAPAK PONIMAN** (Selaku Imam, Panutan, Ayah, Pahlawan Terkuat dan Tidak Terkalahkan Dalam MelindungiKu dan Keluarga) Semoga Dengan Ku Persembahkan Skripsi Ini Ayah lebih Tenang di sisi ALLAH SWT dan Bangga Terhadap putri kecilmu ini Dan **IBU TUMILAH** (Wanita, Ibu, Malaikat Ku Di Dunia, Guru Pertama Sejak Aku Terlahir Di Dunia Ini, Dan Segalanya Buat Ku Untuk Saat Ini Dan Selamanya)

>> **SUAMI TERCINTAKU ALM MAS ZAIFUL GHAZI** (Penyemangat Dan Teman Hidup Terbaik Selama Ini, Tunggu Aku di Surga ALLAH ya Sayang :() **KAKAK TERCINTA MAS AGUS DAN MAS AMIR** (Kedua Saudara, Kakak Terbaik Yang Pernah Ada, Dan Dua Pejantan Tangguh Yang Selalu Ada Untukku)

TERIMAKASIH ☺



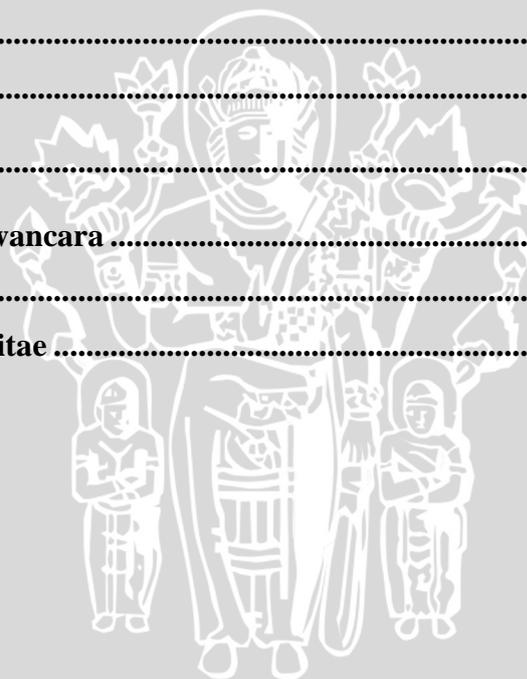
DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Administrasi Publik	14
B. Paradigma Administrasi Publik	17
1. <i>Old Public Administrasi (OPA)</i>	18
2. <i>New Public Management (NPM)</i>	19
3. <i>New Public Service (NPS)</i>	21
C. Pembangunan dan Administrasi Pembangunan.....	25
1. Definisi Pengertian Pembangunan	25
2. Konsep Pembangunan	26
3. Paradigma Pembangunan	26
4. Administrasi Pembangunan	30
D. Definisi Program.	33
E. Evaluasi	36
1. Definisi Evaluasi	36
2. Tujuan Evaluasi.....	41



3.	Jenis dan Metode Evaluasi	43
4.	Konsep Dasar Evaluasi Program	46
5.	Evaluasi Dari Tinjauan Normatif	51
6.	Evaluasi Program PAMSIMAS	53
F.	Program PAMSIMAS	56
1.	Latar Belakang PAMSIMAS	56
2.	Tujuan	58
3.	Sasaran	58
4.	Strategi, Pendekatan dan Prinsip	60
5.	Kondisi Yang Di Arahkan	65
BAB III	METODE PENELITIAN	67
A.	Jenis Penelitian	68
B.	Fokus Penelitian	70
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	71
D.	Jenis dan Sumber Data	72
E.	Teknik Pengumpulan Data	73
F.	Instrumen Penelitian	75
G.	Analisis Data	75
BAB IV	PEMBAHASAN	78
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
1.	Profil Desa	78
2.	Jumlah Penduduk	80
B.	Program Pamsimas	83
1.	Pelaksanaan Program Pamsimas	83
2.	Kondisi Umum dan Permasalahan	98
3.	Mekanisme Pelaksana Program Pamsimas	102
C.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian	105
1.	Evaluasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) antara rencana dengan <i>output</i> yang dihasilkan	105
a.	Ketersediaan Air	105
b.	Anggaran Pembangunan	108
c.	Sarana dan Prasarana	113
2.	<i>Outcome</i> atau Manfaat Sarana dan Prasarana Air Bersih dari Program Pamsimas	123
3.	Dampak dari Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pamsimas	129

a. Dampak Fisik/Lingkungan	131
b. Dampak Ekonomi	134
c. Dampak Sosial	135
D. Pembahasan dan Analisis	138
1. Analisis Terhadap Perbandingan Antara Rencana dengan <i>Output</i> yang Dihasilkan	138
2. <i>Outcome</i> atau Manfaat Sarana dan Prasarana dari Program Pamsimas	143
3. Dampak dari Sarana dan Prasarana Program Pamsimas	145
a. Dampak Fisik/Lingkungan	147
b. Dampak Ekonomi	148
c. Dampak Sosial	149
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	159
A. Pedoman Wawancara	159
B. Surat Riset	164
C. Curriculum Vitae	165



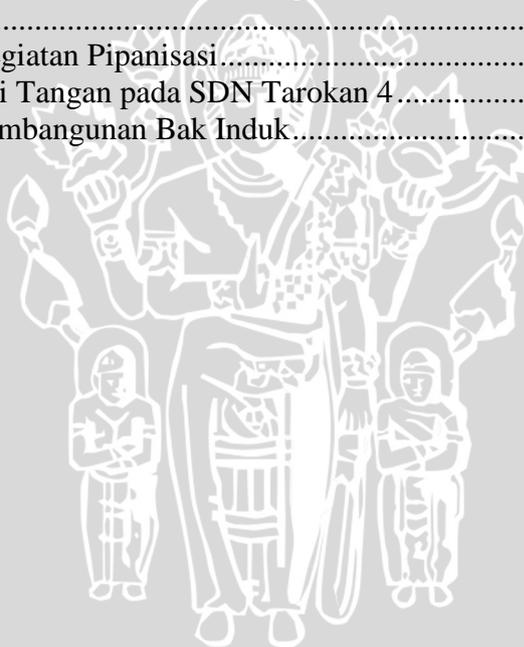
DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Perbandingan Perspektif Administratif Publik Lama, Manajemen Publik Baru dan Pelayanan Publik Baru	23
2. Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi	45
3. Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tarokan	79
4. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Perdesun	80
5. Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur	81
6. Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	82
7. Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk	82
8. Tabel 4.6 Jenis Kegiatan RKM dan Sumber Data pada Kegiatan Pengembangan	95
9. Tabel 4.7 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan	99
10. Tabel 4.8 Jumlah Penduduk dan Akses Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi Berdasarkan Hasil IMAS	100
11. Tabel 4.9 Identifikasi Penyebab Terjadinya Masalah	101
12. Tabel 4.10 Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM	109
13. Tabel 4.11 Realisasi Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM	110
14. Tabel 4.12 Rencana Penambahan Akses dari Pamsimas	115
15. Tabel 4.13 Jenis Kegiatan Peningkatan Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah	116
16. Tabel 4.14 Penerima Manfaat Program Pamsimas 2014 Reguler di Desa Tarokan, Kec. Tarokan Kab. Kediri	124



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Target MDGs Terkait Air dan Sanitasi	2
2. Gambar 2.1 Paradigma Administrasi Publik	17
3. Gambar 2.2 Logika program, <i>Adapted from Gary Woller, 2007</i>	47
4. Gambar 3.1 Proses Analisis Data Miles dan Huberman.....	77
5. Gambar 4.1 Peta Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri.....	79
6. Gambar 4.2 Tahapan Kegiatan Pembangunan SPAMS.....	88
7. Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas	104
8. Gambar 4.4 Sitem Penyediaan Air Minum dengan Sistem Gravitasi.....	114
9. Gambar 4.5 Rencana Pembangunan Cuci Tangan Pakai Sabun.....	117
10. Gambar 4.6 Rencana Pembangunan <i>Broncapt</i>	117
11. Gambar 4.7 Rencana Bak Induk yang akan dibangun.....	118
12. Gambar 4.8 Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Sistem Gravitasi pada Bak Penampung Dusun Sagi	119
13. Gambar 4.9 Realisasi Kegiatan PIPANISASI.....	119
14. Gambar 4.10 Tempat Cuci Tangan pada SDN Tarokan 4.....	121
15. Gambar 4.11 Realisasi Pembangunan Bak Induk.....	122



DAFTAR LAMPIRAN

1.Pedoman Wawancara.....	159
2.Surat Riset.....	164
3.Curriculum Vitae	165



BAB I

PENDAHULUAN

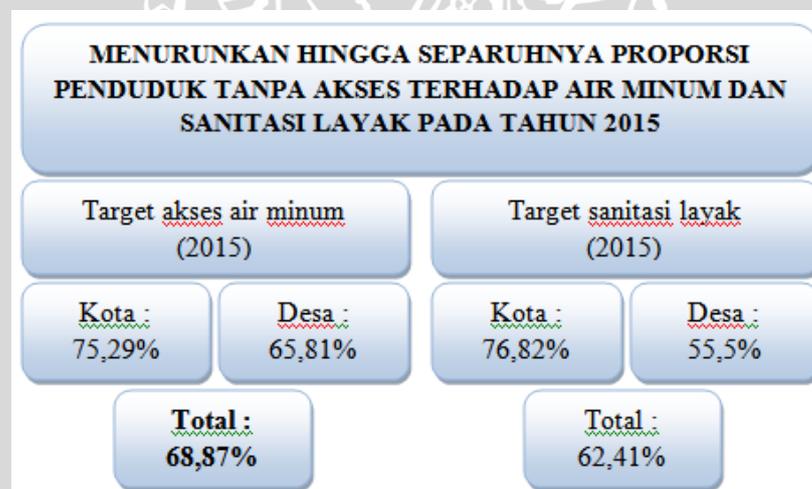
A. Latar Belakang

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang mempunyai delapan (8) tujuan dengan delapan belas (18) sasaran. Delapan tujuan tersebut adalah; 1). Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2). Mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3). Mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, 4). Menurunkan angka kematian anak, 5). Meningkatkan kesehatan ibu, 6). Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menulat lainnya, 7). Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 8). Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan bentuk dari tujuan yang ketujuh dari MDGs yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, sasaran yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan sanitasi adalah sasaran ke sepuluh. Sasaran tersebut “pada tahun 2015 mendatang mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat”, sehingga pada sasaran ke sepuluh membahas tentang penurunan sebesar separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan padatahun 2015 (UNDP, 2004).

Menurut penelitian pada tahun 2010 oleh MDGs (*Millenium Development Goals*) Asia Pasifik, untuk sektor air bersih dan sanitasi di Indonesia cakupan akses nasional rata-rata telah mencapai 80 persen. Dengan angka prosentase tersebut indonesia telah melampaui target dari MDGs yang hanya 74 persen.

Namun, hal tersebut baru sebatas kuantitas, bukan kualitas. Apabila di tinjau dari kuantitas dan kualitas masih berkisar 51,02 persen keluarga di Indonesia yang memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Targetnya, pada tahun 2015 akses air bersih dan sanitasi dapat naik hingga di angka 60 persen hingga 70 persen (UNDP, 2004).

Pengelolaan sumber daya air bersih telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Namun, masih ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam belum berkualitas, sehingga masyarakat untuk mendapatkan air bersih harus membayar biaya yang cukup tinggi (sebesar Rp.400,- ukuran 240 ml) untuk mendapatkan segelas air yang layak bagi kesehatan.



Gambar 1.1 Target MDGs Terkait Air dan Sanitasi

Sumber : Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milineum di Indonesia Tahun 2010

Permasalahan dari penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk adalah rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang buang air besar

sembarangan tentu menyebabkan buruknya kualitas air, terutama pada sumber-sumber air yang seharusnya menjadi sumber penghidupan warga, dengan tingkat populasi yang tinggi.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi sebagai bentuk pelayanan publik. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah perdesaan yang relatif luas, penduduk miskin relatif tinggi dan memiliki kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuannya terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas.

Di Indonesia alokasi dana APBD untuk sanitasi masih rendah. Berdasarkan data dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2010 yang lalu, rata-rata alokasi belanja sanitasi seluruh kota dan kabupaten di Indonesia masih angka 1,5 persen dari total belanja APBD. Dibandingkan pada saat tahun 2006 yang alokasi rata-ratanya hanya 0,5 persen, hal itu mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, berkaca dari kondisi Indonesia saat ini, hal itu tentu jauh dari kata layak, karena kondisi air bersih dan sanitasi di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan.

Cakupan persediaan air bersih dan sanitasi yang rendah tersebut, berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Data kematian bayi 35 per 1000 kelahiran di Indonesia, angka yang lebih besar terjadi pada masyarakat miskin yaitu 121 per 1000 kelahiran. Dua dari empat penyebab kematian balita adalah diare dan typhus (Pamsimas 2011). Keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kejadian *typhoid* (dalam bahasa keseharian disebut penyakit *tifus/tifes* penyakit ini disebabkan karena bakteri) tinggi.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penduduk dunia yang berkomitmen untuk mencapai MDGS khusus bidang *Water Supply and Sanitation* (WSS) yaitu menurunkan jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi sebesar 50% pada tahun 2015. Ada dua jalur upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di sektor air minum, salah satunya pembangunan yang berbasis masyarakat, dilakukan dengan cara Pemerintah pusat dan Provinsi mengajak pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap *stakeholder* bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan air dan sanitasi tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) atau *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Community-3* (WSLIC-3) Sebagai lanjutan dari Program WSLIC-2 dan Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat). Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat miskin perdesaan dan pinggiran kota (*peri*

urban) terhadap layanan air minum dan sanitasi serta praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan, dengan membangun model penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat, yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi dan diperluas di daerah lain, dalam upaya mencapai target *WSS Millenium Development Goals (MDGs)*.

Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi untuk warga miskin perdesaan dan pinggiran kota, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten atau kota di Indonesia. (Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas, 2013).

Dalam meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi untuk pencapaian target MDGs, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Program Pamsimas II (WSLIC-3 AF) dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. (Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas, 2013)

Program Pamsimas II dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan

miskin, dan lain-lain.) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. (Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas, 2013)

Ruang lingkup program Pamsimas II mencakup 5 (lima) komponen program: 1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah; 2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4) Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; dan 5) Dukungan manajemen pelaksanaan program. (Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas, 2013)

Kurang memadainya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi berkaitan erat pada pengentasan kemiskinan. Dimana sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang baik dapat berdampak pada meningkatnya kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang akhirnya juga berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat. Pelayanan publik melalui program PAMSIMAS ini harus dapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan, disini pemerintah selaku pembuat program dan kebijakan harus dapat menjamin keberlanjutan program ini baik dalam pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarananya. Namun masyarakat sebagai pengguna layanan

harus dapat ikut berpartisipasi dalam perawatan dan ikut memelihara fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas (2013)

Tujuan strategis dari program Pamsimas itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersedia meningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, dan sanitasi berkelanjutan yang layak untuk masyarakat di wilayah perdesaan dan pinggiran kota;
- 2) Masyarakat sasaran bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- 3) Masyarakat sasaran memperoleh akses yang keberlanjutan terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang aman, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola keberlanjutan sistem pelayanan secara mandiri dan efektif.
- 4) Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas.
- 5) Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut pemerintah bekerjasama dengan bank dunia sejak tahun 2008 memberi bantuan untuk masyarakat yang terbatas akses air bersih dan kekurangan sanitasi dasar serta berpenghasilan rendah (miskin) di seluruh Provinsi di Indonesia melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Di Provinsi Jawa Timur salah satu kabupaten yang menerima program pamsimas adalah Kabupaten Kediri.

Kabupaten Kediri adalah penerima Program Pamsimas Tahun 2014. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 Kecamatan dan 343 desa, namun tidak semua desa menerima program Pamsimas. Pada program Pamsimas II tepatnya tahun

2014 terdapat 8 desa yang menerima Program Pamsimas salah satu Desa yang menerima Pamsimas II Tahun 2014 adalah Desa Tarokan. Desa Tarokan ini merupakan Desa yang memiliki letak kondisi geografis pada dataran tinggi, curam dan tidak merata. Kondisi yang demikian, sulit bagi masyarakat sekitar untuk menyalurkan air bersih jarak antara sumber air bersih dan rumah penduduk cukup jauh. hal ini mengakibatkan distribusi air bersih dari PDAM belum dapat menjangkau. Penduduk biasanya menggunakan air bersih melalui pembangunan sumur bor atau sumur galian dan masih banyak penduduk yang menggunakan sungai untuk mencuci pakaian.

Desa Tarokan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu kurang lebih 5.352 kepala keluarga (KK) atau sekitar 13.980 Jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk yang telah menggunakan sumber air minum layak sampai dengan saat ini adalah 1.100 kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 3.500 jiwa dan jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sampai saat ini adalah sekitar 5.050 kepala keluarga (KK) atau sekitar 12.413 jiwa (Rencana Kerja Masyarakat 2014).

Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan secara efektif sangat dibutuhkan di Desa Tarokan, sarana air bersih dan sanitasi yang dapat berfungsi terus menerus, sehingga pengguna mendapat kepuasan yang tinggi dan bersedia untuk menggunakan dan memelihara sarana, serta sebagian besar masyarakat mempunyai akses. Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang digunakan secara efektif adalah sarana yang oleh sebagian besar masyarakat

digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan melestarikan lingkungan.

Tingkat keberhasilan Program Pamsimas pada Desa Tarokan ini perlu untuk diketahui sehingga dapat dianalisis apakah program yang dilaksanakan di lapangan sudah sesuai dengan rencana. Untuk menilai keberhasilan sebuah program maka perlu untuk diketahui dan dianalisis bagaimana *output*, *outcome* dari program tersebut, dan dampak yang di timbulkan dari program tersebut maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah evaluasi program.

Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan yang tersaji diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi dengan mengangkat judul : **“Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014 (Studi Pada Desa Tarokan Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan Kabupaten Kediri tersebut?
2. Bagaimana *Outcome* dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana *Impact* Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka dapat dijabarkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
2. Mendiskripsikan dan menganalisis *outcome* dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
3. Mendeskripsikan dan menganalisis *impact* dari pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan Kabupaten Kediri.

D. Kontribusi Penulis

Penelitian ini dilakukan pada Desa Tarokan, Kabupaten Kediri. Ada beberapa manfaat yang dapat diwujudkan, antara lain:

Secara teoritis :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan secara konseptual mengenai evaluasi program pemerintah dan untuk memperkaya khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih konkrit mengenai program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
3. Sebagai sarana pengembangan aktualisasi diri untuk mengembangkan ilmu yang ada di masyarakat.
4. Mengembangkan ilmu administrasi publik terutama pada aspek evaluasi dari problematika yang ada serta sebagai sumbangan peneliti bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut

Secara Praktis :

1. Memberikan masukan kepada seluruh *stakeholder* terkait program PAMSIMAS selanjutnya yang lebih baik.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.
3. Memberi masukan dalam penyempurnaan kebijakan kesehatan khususnya program PAMSIMAS
4. Ditemukannya pengaruh dan dampak dari pelaksanaan program PAMSIMAS maka akan berguna menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat

5. Mengungkapkan kenyataan yang dialami oleh masyarakat Desa Tarokan yang belum seluruhnya memperoleh air bersih yang memadai sehingga dapat menggerakkan pengetahuan dan perspektif pembaca.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang menyajikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang berkenaan dengan administrasi publik, pembangunan dan administrasi pembangunan, program, evaluasi, evaluasi program dan program pamsimas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan teknik yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin dari bahasa latin (yunani) yang terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan (Pasolong, 2008 : 1-2).

Pengertian administrasi menurut Sugandha (1991 : 14) berarti seluruh proses kegiatan penetapan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien bersama-sama melalui orang-orang yang terkoordinir dengan *PEOPLE* yang terkoordinir juga. *PEOPLE* adalah akronim dari *Planning, Executing, Organizing, Persuading, Leading,* dan *Evaluating*, yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan), berarti merencanakan kegiatan sebelum pelaksanaan.
2. *Executing* (Pelaksanaan), berarti menjalankan semua fungsi itu melalui pemerintah, membuat keputusan-keputusan, dengan menetapkan teknik komunikasi, penelitian untuk mendapatkan informasi, secara hubungan kemanusiaan.
3. *Organizing* (Pengorganisasian), mengelompokkan orang, menyempurnakan organisasi, bahkan membentuk organisasi.

4. *Persuading* (penggairahan), dalam arti mendorong untuk bergairah kerja.
5. *Leading* (pemimpin), dalam arti menggerakkan, memimpin.
6. *Evaluating* (Penilaian), memberikan penghargaan dan penerimaan.

Administrasi publik adalah proses yang mana sumber daya manusia dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2004 : 6).

Selanjutnya Keban (2004 : 6) juga menulis bahwa :

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih *responsive* terhadap kebutuhan sosial. Adminiatrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efesiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Zauhar (1996: 33) Mendefinisikan administrasi publik sebagai proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik. Atau dengan rumusan yang agak spesifik, administrasi publik adalah proses kerjasama antara suatu organisasi publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Tjokroamidjojo (1980: 3) membagi fungsi administrasi negara menjadi tiga hal, yaitu :

1. Formulasi/perumusan kebijakan

Mengenai fungsi ini ada empat subfungsi yaitu:

- a. Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada;

- b. Perumusan kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (*forcase*) dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan (*alternative courses of action*) yang mungkin dilalui;
 - c. Suatu program strategi dan taktik kegiatan-kegiatan yang berdasar poin a dan poin b dapat disusun;
 - d. Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (*decision making*).
2. Pengaturan / pengendalian unsur-unsur administrasi.
- Unsur-unsur administrasi ini ialah struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sasaran-sasaran lain. Tugas administrasi ialah mendapatkan, menggunakan, menendalikan, keempat elemen administrasi tersebut diatas.
3. Penggunaan dinamika administrasi.

Sementara itu, Pasolong (2008 : 21) menyebutkan rang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

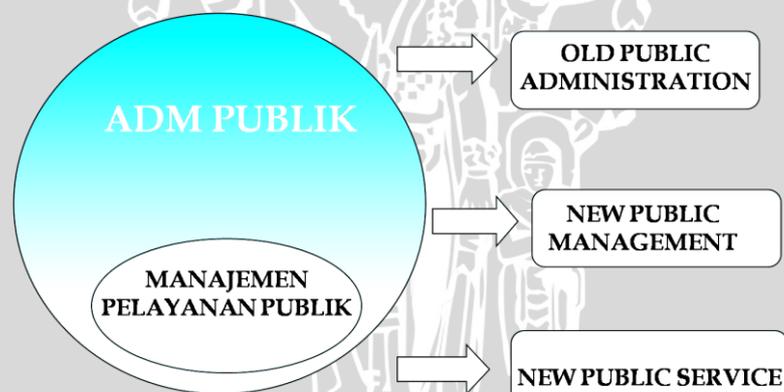
1. Kebijakan publik
2. Birokrasi publik
3. Manajemen publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan publik
6. Administrasi kepegawaian negara
7. Kinerja
8. Etika administrasi

Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama dari berbagai sumberdaya organisasi, baik sumberdaya modal, sumberdaya manusia, maupun sumber daya material, di setiap bagian organisasi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan agar tercipta efesiensi dan efektifitas kerja organisasi dengan tiga fungsi dasar yang mencakup formulasi, pengaturan, dan penggunaan dinamika administrasi.

B. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir dan sudut pandang seseorang yang akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan permasalahan yang ada, sehingga nanti pada akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang tersebut menanggapi realita dan permasalahan yang ada.

Administrasi publik terus berkembang dan berevolusi mengikuti irama perkembangan masyarakat. Dinamika dan tuntutan sebagai tanggung jawab dari sebuah ilmu maka arus pengetahuan administrasi publik terus berputar mengikuti tuntutan sekaligus memberikan solusi nyata akan persoalan administrasi publik yang mengatur dan memenuhi kebaikan bersama.



Gambar 2.1 Paradigma Administrasi Publik

Sumber: Buku Ilmu Administrasi Publik, oleh Inu Kancana Syafii-Djamaludin Tandjung- Supardan Modoeong, Rieke CIPTA (1999)

Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, setidaknya ada tiga paradigma dalam perspektif administrasi publik yang dapat kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik. Ketiga paradigma atau perspektif tersebut adalah : pertama, Teori Administrasi

Lama (*Old Public Administration/ OPA*), Kedua, Teori Administrasi Baru (*New Public Management / NPM*), dan yang ketiga adalah *New Public Service/ NPS*).

1. *Old Public Administration (OPA)*

Fenomena praktek pelayanan publik dalam paradigma *Old Public Administration* menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan sebagai pelanggan yang harus di puaskan (Hesti, Khalikussabir dan Kurniawan 2012 : 56)

Pemerintah menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mengetahui, memiliki sumber daya dan mempunyai kemampuan memecahkan masalah publik. Oleh karena itu, pemerintah yang paling *legimate* untuk memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini juga disertai dengan pendekatan birokratis yang mengandalkan hubungan hirarki yang bersifat *top down* (Hesti, Khalikussabir dan Kurniawan 2012 : 56).

Paradigma Administrasi Publik model klasik juga dapat dilihat melalui model "*old chesnuts*" dari Peters (1996 dan 2001) , dimana Administrasi Publik berdasarkan pada Pegawai Negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkhis dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam (Oluwu, 2002 dan Frederickson, 2004) dalam Zaidan, 2010. Dalam hal ini karakter *Old Public Administration* dicirikan oleh kegiatan pemerintah yang terfokus pada

pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator Publik yang akuntabel dan bertanggungjawab secara demokratis kepada *elected official*. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam *Old Public Administration* adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator Publik didefinisikan sebagai *planning, organizing, staffing, directing, coordinating dan budgeting*.

2. *New Public Management (NPM)*

Gelombang manajemen sektor publik dimulai dari dua decade yang lalu yang dikembangkan di negara maju seperti Inggris, Australia dan New Zealand melalui teori administrasi publik baru atau lebih dikenal dengan *New Public Management* yang mendorong negara menuju manajerialisme (Clarke dan Newman 1997 dan Lantieri 1999) dalam Hesti, Khalikussabir dan Kurniawan 2012.

Dalam *New Public Management*, praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan. Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan sedangkan pemerintah berperan sebagai yang mengarahkan pasar. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan mekanisme dan struktur sosial yang mendukung, yakni melalui organisasi privat maupun non profit.

Hood dalam (Keban, 2004 : 34) mengungkapkan bahwa ada 7 komponen doktrin dalam *New Public Management*, yaitu :

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Pengguna indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar dari pada kontrol output
4. Pergeseran perhatian pada unit-unit yang lebih kecil
5. Pergeseran kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan pada sektor swasta pada praktek manajemen
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumberdaya.

Beberapa prinsip yang Administrasi Publik tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencapai dalam banyak hal, Publik seringkali tidak ditibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, meencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil untuk dapat menjamin bahwa Publik tetap menjadi pusat dan tindakan-tindakan pemerintah (Zaidan, 2010).

NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat dan melalui mekanisme pasar. Pada dasarnya hal yang baru dalam NPM (*What Is New Public Management*) adalah mereformasi paradigma administrasi publik lama yang berbasis *Traditional Ruled Based, Authority Driven Process* dengan pendekatan baru yang berbasis *Market-Based* dan *Competition Driven Based* (Zaidan, 2010).

NPM telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettegrew dalam Keban (2004 : 25), yaitu :

1. Orientasi *The Drive* yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja.
2. Orientasi *Downsizing and Decentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.

3. Orientasi *In Search of Excellence* yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Orientasi *Public Service* yaitu mengutamakan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi "user" dan warga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan "social learning" dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

3. *New Public Service (NPS)*

Di tahun 2003, atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian muncul lagi paradigma baru yaitu "New Public Service" (NPS) oleh J.V Denhart dan R.B. Denhart dalam Pasolong (2008 : 35), keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan beralih ke prinsip *New Public Service*.

Dalam *New Public Service*, dasar-dasar teoritis yang ingin di gunakan berkaitan dengan teori-teori demokrasi dengan berbagai pendekatan yang positivistik, impretatif dan juga kritis. Pelayanan publik di kembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang di devinisikan melalui proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional. Dengan demikian, peran pemerintah adalah melayani (*servicing*), tidak lagi steering atau bahkan rowing dan posisi publik bukan lagi sekedar klien, konstituen ataupun pelanggan, tapi lebih sebagai warga negara (*citizen*) (Hesti, Khalikussabir dan Kurniawan 2012 : 59).

Denhardt dan Denhardt dalam (Hesti, Khalikussabir dan Kurniawan 2012 : 60) menyatakan bahwa NPS atau pelayanan publik baru, fokus pada isu-isu penting sebagai berikut :

a. *Serve Citizens, Not Costumer*

Apa yang menjadi kepentingan publik merupakan hasil dialog publik (public shared value), bukan sekedar agregasi kepentingan individual, pejabat publik tidak hanya sekedar merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan tetapi lebih fokus pada bagaimana membangun relasi kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga.

b. *Seek The Public Interest*

Administrator public harus memberikan kontribusi dalam mengembangkan kolektivitas, gagasan-gagasan tentang kepentingan publik. Tujuan bukan menemukan solusi cepat yang berdasarkan pilihan-pilihan individual, tetapi lebih pada bagaimana menciptakan apa yang menjadi kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.

c. *Value Citizenship Over Entrepreneurship*

Kepentingan public lebih baik bila di tunjukkan dalam komitmen publik dan pejabat publik untuk membuat kontribusi yang lebih bermakna untuk masyarakat luas ketimbang kepiawaian (entrepreneurship) pejabat public dalam mengembangkan dirinya sendiri.

d. *Think Strategically, Act Democratically*

Kebijakan public dan program merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan publik, dan dapat dicapai secara efektif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan melalui usaha bersama dan proses yang kolaboratif.

e. *Recognize that Accountability is Not Simple*

Pejabat publik harus lebih memperhatikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar professional dan kepentingan-kepentingan publik.

f. *Serve rather than Steer*

Lebih penting bagi pejabat publik untuk berbagi dengan publik sebagai basis kepemimpinannya dalam membantu masyarakat untuk mengartikulasikan menemukan apa yang menjadi kepentingan bersama ketimbang mengendalikan atau mengarahkan publik.

g. *Value People, not Just Productivity*

Organisasi publik dan jaringannya dalam berpartisipasi akan lebih berhasil untuk jangka panjang apabila mereka bekerja secara

kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua masyarakat.

Konsep pelayanan publik sudah bergeser dan berkembang sedemikian rupa. Secara essential perubahan tersebut cukup signifikan baik secara substantif maupun teknis operasionalnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Perspektif Administratif publik lama, Manajemen Publik Baru dan Pelayanan Publik Baru

Pisau Analisa	Administrasi Publik Lama	Administrasi Publik Baru	Pelayanan Publik Baru
Teori dasar dan Landasan Epistemologi	Teori publik, sosial dan argumen politik yang menafikkan ilmu sosial	Teori ekonomi, yang diperlengkap dengan dialog berdasarkan positivistik ilmu sosial	Teori demokrasi, yang divariasikan dengan pendekatan pengetahuan termasuk positivistik, interpretative dan kritis
Konsepsi dari Kepentingan Publik	Kepentingan publik adalah penjelasan dari politik yang diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik merepresentasikan agregasi dari kepentingan	Kepentingan publik adalah hasil dari dalog bersama akan nilai
Kepada siapa aparat pelayanan bertanggung jawab	Klien dan konsumen	Pelanggan	Warga negara
Peran pemerintah	Mengendalikan (mendesain menerapkan kebijakan yang berfokus pada satu tujuan politis tertentu)	Mengarahkan (bertindak sebagai katalis untuk melepaskan kekuatan pasar)	Melayani (negosiasi dan bertindak sebagai broker dan kepentingan warga negara dan komunitas atau kelompok masyarakat)

Pisau Analisa	Administrasi Publik Lama	Administrasi Publik Baru	Pelayanan Publik Baru
Mekanisme untuk mencapai kebijakan publik	Tujuan tergantung dari keberadaan agensi pemerintah	Mekanisme yang dibuat dan struktur insentif untuk mencapai tujuan publik melalui agensi swasta dan lembaga non-profit	Membuat nilai bersama, membangun koalisi publik, lembaga non-profit dan lembaga swasta untuk mencapai kesepakatan dalam kebutuhan bersama
Pendekatan akuntabilitas	Hirarki administrasi yang bertanggung jawab kepada pimpinan politik	Pada kepentingan pasar, dimana akumulasi dari kepentingan pribadi (warga atau pelanggan)	Multidimensi, pejabat publik tunduk pada hukum, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional dan kepentingan warga negara
Diskresi administrasi	Diskresi terbatas	Garis yang melebar untuk mencapai tujuan kewirausahaan	Diskresi dibutuhkan tetapi hanya terbatas
Struktur organisasi	Birokrasi, otoritas atas bawah, kontrol regulasi klien	Organisasi publik yang terdesentralisasi	Struktur yang terkolaborasi dengan kepemimpinan bersama antara eksternal dan internal
Dasar motivasi dari pelayanan dan administrator	Dibayar dan mendapat keuntungan, perlingungan pelayanan umum	Semangat kewirausahaan, dan ideologis untuk pengurangan besaran pemerintah	Pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat

Sumber: Hesti, Khalikussabir dan Kurniawan 2012

C. Pembangunan dan Admisistrasi Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Bryant dan White (1982) dalam Suryono (2004:35), menyebutkan terdapat 5 (lima) implikasi yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan, yaitu:

- a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*);
- b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*);
- c) Pembangunan berarti mendorong kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
- d) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri (*sustainability*); dan
- e) Pembangunan merata mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Sedangkan menurut Siagian (1983:3) dalam Suryono (2004:21) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses;
- b) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
- c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaanya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d) Pembangunan mengarah kepada modernitas;

- e) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; dan
- f) Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Jadi dari definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya.

2. Konsep Pembangunan

Menurut Suryono (2004:26), tinjauan terhadap konsep pembangunan dilakukan dengan aspek penting, yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik.

“Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun. Kata bangun setidaknya mengandung 4 arti : (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*)”.

3. Paradigma Pembangunan

Suryono (2004: 15-25) mengemukakan beberapa paradigma pembangunan. paradigma pembangunan tersebut meliputi :

a. Strategi Pertumbuhan

Dimulai pada sekitar dasawarsa 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan “*growth priority*” yang memfokuskan diri pada akumulasi capital nasional dengan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilannya, dengan ditingkatkan pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara dunia ketiga dapat terpecahkan.

b. Pertumbuhan Dengan Pemerataan

Strategi ini dari empat pendekatan pokok, yaitu:

- 1) Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien, yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
- 2) Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
- 3) Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.

4) Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-golongan miskin. Fokus dari strategi ini mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional.

c. Teknologi Tepat Guna

Menurut Ardant (1989) dalam Suryono (2004), pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola masyarakat, melainkan juga dapat melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang karena melalui teknologi tepat guna ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan penduduk.

d. Kebutuhan Dasar Pembangunan

Konsep pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk tergolong miskin, dengan kata lain adalah serangan langsung terhadap kemiskinan . kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada papan, pakaian, dan pangan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan.

e. Pembangunan Berkelanjutan

Menurut World Commission (1987) dalam Suryono (2004), pembangunan berkelanjutan adalah :

“Suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semua diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang”.

f. Konsep Pemberdayaan

Friedman (1992) dalam Suryono (2004), mengemukakan konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

g. Pembangunan Berpusat Pada Manusia

Menurut Suryono (2004) konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan system nilai, gerakan, metode, strategi, dan indikator yang menjadi dominan setiap negara berkembang. Suryono menyatakan bahwa pembangunan sebagai sebuah sistem mencakup:

- 1) Komponen masukan, terdiri dari nilai, sumberdaya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat, komponen proses terdiri dari kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program melaksanakan program-program pembangunan.

2) Komponen Keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi, dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah, dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat. Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yang didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat selaku subyek pembangunan.

Sedangkan pendekatan pembangunan sebagai strategi berorientasi pada :

- a) Pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum miskin melalui peningkatan pelayanan sosial.
- b) Penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan.
- c) Pertanian sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit, informasi, input, dan infrastruktur pasar bagi masyarakat miskin.
- d) Teknologi padat karya dan tepat guna.
- e) Penekanan pada aspek sosial, politik, dan ekonomi dari pembangunan.

4. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu pertama, tentang administrasi yang kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*) (Siagian 1983 : 2-3).

Siagian (2003 : 5) memberikan pengertian administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan tentang bangsa yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan akhirnya. Pada intinya, administrasi pembangunan itu adalah suatu studi tentang sistem administrasi negara dalam negara yang sedang membangun yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dan menunjuk pada peran pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Ide pokok pembangunan menurut Siagian, bahwa pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usahayang secara sadar dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas dicapai melalui pembangunan multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya. Soedjatmoko dalam Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1984 :

1) menulis :

“Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining process*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerinatah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu ‘*interwill*’, proses emansipasi

diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses kedewasaan”.

United Nations Organisation mendefinisikan pembangunan sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 1984 :1). Tjokroamidjojo (1980 : 13) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (Administrasi) oleh negara atau pemerintah untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah keadaan yang lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk mendorong perubahan-perubahan suatu masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik di kemudian hari.

Lebih lanjut, Tjokroamidjojo (1980 : 9 – 10) membagi administrasi pembangunan menjadi tujuh ciri khusus sebagai berikut:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang di rumuskan kebijakannya melalui proses politik.
- c. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan, atau berorientasi pada masa depan.
- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti telah disebutkan terdahulu, yang terakhir juga dapat di sebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian instrument-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan

pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai “*development agent*”.

- e. Adminisstrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan perkataan lain, administrasi dari kebijakan dan isi program-program pembangunan.
- f. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*Change of agents*).
- g. Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Menurut pendapat beberapa ahli diatas berarti dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses pembangunan suatu negara dengan seluruh usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan tentang negara yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Definisi Program

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu di tekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

- 1) Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- 2) Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- 3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Menurut Malayu Hasibuan (2006:72) definisi program dapat diartikan sebagai berikut : “ Program adalah suatu jenis rencana yang konkrit karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan”. Adapun definisi program menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah: “Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”.

Dari pendapat sebelumnya dapat dikatakan bahwa program merupakan instrument kebijakan yang digunakan agar terlaksananya suatu kebijakan. Program merupakan unsur terpenting demi terciptanya suatu kegiatan. Menurut Arikunto dan Jabar (2004:34) Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam sebuah program terdapat beberapa aspek yaitu berupa tujuan kegiatan, aturan yang harus di pegang dalam kegiatan, anggaran atau biaya yang digunakan, dan strategi pelaksanaan kegiatan. Melalui program segala sesuatu rencana yang telah disusun dapat dioperasionalkan dengan mudah dan teratur.

Sedangkan menurut Charles O. Jones (1991:296) Program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan mulai melakukan intervensi. Untuk itu harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah tersebut terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik. Ada beberapa karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, diantaranya:

- 1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

- 2) Program sebisanya memiliki anggaran sendiri, program terkadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- 3) Program memiliki identitas sendiri, yang jika berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program merupakan alat untuk merealisasikan suatu kebijakan yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang telah disusun secara terencana, dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan berkesinambungan yang melibatkan banyak orang.

E. Evaluasi

1. Definisi Evaluasi

Evaluasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai. Dalam kamus besar balai pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah evaluasi dalam modul sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*).

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen yang dimana meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek. evaluasi sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia akan tetapi kata

ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran Arikunto dan Jabar (2004:27)

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan Hikmat dalam Arikunto dan Jabar (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin dalam Tilaar dan Nugroho (2008:69) menyatakan:

“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki, Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendiskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Lebih lanjut menurut Sudjana dalam Dimiyati dan Mudjiono, (2010:191), “dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkan dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula

evaluasi langsung melalui penilaian saja”. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford dalam Dimayati dan Mudjiono(2006:191) mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.

Dalam Buku Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi Karangan Dr. Wirawan, Evaluasi diartikan sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Melalui pengertian-pengertian diatas, maka ditemukan beberapa komponen dalam evaluasi diantaranya:

- a) Objek Evaluasi. Objek evaluasi adalah apa yang akan dievaluasi – Steward I. Donaldson dan Mark W. Lipsey (2006) dan Michael M.Provus (1972) menggunakan *evaluand* dan *evaluee* jika objeknya orang, adalah apa yang diteliti dalam evaluasi. Karena evaluasi dilakukan disemua sektor kehidupan, setiap sektor mempunyai objek evaluasi yang unik.
- b) Informasi. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan atau dinilai dengan indikator objek evaluasi.

- c) Menilai. Evaluasi melakukan penilaian kualitas (*merit*) yakni baik buruknya atau tinggi rendahnya kualitas atau kinerja program yang dievaluasi, dan penilaian manfaat (*Worth*) yakni tinggi rendahnya manfaat program dalam kaitannya dengan suatu tujuan atau standar tertentu.
- d) Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Informasi mengenai objek evaluasi dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Bila program tidak memenuhi tolok ukur keberhasilannya, maka perlu dilakukan perubahan atau pengembangan. Sebaliknya, jika hasil evaluasi menyatakan program berhasil program tersebut akan diteruskan atau dilaksanakan didaerah lain.

Sebagaimana Menurut Peter H. Rossi & Howard E. Freeman dalam Wirawan(2011:15-16) evaluasi diartikan, "*Evaluation research is a systematic application of social research prosedures in assesing the conseptualization and design, implementation, and utility of social interventiaon programs.*" Menurut kedua pakar evaluasi tersebut evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konseptualisasi, dan pendesainan, implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Buku dan halaman yang sama, Vendung dalam Wirawan (2011:16) menyatakan "*Evaluastion is limited to goverment intervention only,that is, politically or administratively planned social change, like*

public policies, public programs, and public services.” Menurut Vendung, evaluasi berkaitan dengan intervensi pemerintah yaitu perubahan sosial politik dan administratif yang direncanakan misalnya kebijakan publik, program publik, dan layanan publik. Vendung juga mengatakan bahwa intervensi publik dewasa ini meliputi program-program substantif dan yang berorientasi dengan proses. Program-program substansif meliputi berbagai domain fungsional. Intervensi pemerintah berorientasi pada proses yaitu reformasi administrasi berkaitan dengan ide-ide dan langkah-langkah yang diarahkan pada organisasi dan fungsi administrasi publik. Evaluasi melihat kebelakang agar dapat menyetir ke depan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sebagai pejabat publik dalam pekerjaannya dimasa akan datang dapat bertindak serta bertanggungjawab, kreatif, dan seefisien mungkin.

Dalam evaluasi, evaluator berusaha menggambarkan apa yang telah terjadi dan dipihak lain ia menjelaskan mengapa itu terjadi. Dalam melakukan ini, evaluator mengamati apa yang berlangsung sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan. Untuk mempermudah evaluator dalam melakukan penilaian atas sebuah objek evaluasi maka dilakukanlah seleksi indikator-indikator yang akan dipakai untuk menilai hasil-hasil kebijakan ataupun program. Menurut IEES dalam Hadi dan Mutrofin (2006:84-85), pemilihan indikator merupakan tahapan penting dalam

melaksanakan evaluasi, karena merupakan basis evaluator menentukan bagaimana kriteria evaluasi akan didefinisikan secara operasional.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh manakah keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang telah dicapai oleh suatu program tersebut. Karenanya dalam keberhasilana terdapat dua konsep yaitu efektifitas dan efisiensi. Echols dan Shadily (2000:76) mendefinisikan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara *output* dan *inputnya*, sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses”.

2. Tujuan Evaluasi

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa evaluasi program dapat digunakan untuk mengetahui beberapa hal mulai dari pelaksanaan program, kesesuaian tindakan pelaksanaan dengan standart prosedur yang telah ditetapkan, *output* yang dihasilkan, hingga akibat yang ditimbulkan oleh adanya sebuah program. Menurut Mark, Henry dan Julnes Iskandar (2012) dalam Iskandar (2012) ada empat tujuan evaluasi program, yaitu :

- a. Menilai kekuatan dan kelemahan program, mengembangkan penilaian terhadap nilai suatu kebijakan program pada level individu atau masyarakat.
- b. Peningkatan organisasi dan program, sebagai upaya menggunakan informasi secara langsung untuk memodifikasi dan meningkatkan pelaksanaan program.
- c. Menilai seberapa luas sebuah program sesuai dengan undang-undang, regulasi, aturan dan harapan.

- d. Mengembangkan pengetahuan, menemukan atau menguji teori, preposisi dan hipotesa dalam lingkup kebijakan dan program.

Disisi lain tujuan evaluasi menurut Jones (1991:357) dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis)
 - a. Apakah program tersebut memberikan manfaat bagi seluruh negara?
 - b. Dapatkan hal tersebut ditafsirkan untuk membuka peluang bagi *re-election* (pemilihan kembali), misalnya pemilihan presiden?
2. *Organizational Evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional)
 - a. Apakah program tersebut menimbulkan dukungan bagi badan-badan pelaksana?
 - b. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dihabiskan?
3. *Substantive evaluation* (evaluasi yang bersifat nyata)
 - a. Apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang dicanangkan (menurut hukum) ataupun seperti yang diutarakan dalam spesifikasi selanjutnya?
 - b. Dampak apakah yang dimiliki program tersebut permasalahan yang ditujunya?

Sebuah program diciptakan dan dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan banyak pihak, yang artinya banyak pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Apakah program tersebut tepat sasaran terhadap orang dikenai program atau apakah program tersebut telah berhasil dijalankan sesuai tujuan yang diinginkan oleh pemegang kepentingan atas sebuah program. Tujuan dari dilaksanakannya evaluasi memberikan informasi, penilaian dan pengukuran sebuah program kepada *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas program dan menentukan prioritas program.

3. Jenis dan Metode Evaluasi

Menurut *Departement For International Development* (DFID) (2005) dalam Iskandar (2012) konteks umum evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada saat imlementasi program berjalan dan bertujuan pada peningkatan kinerja program yang dievaluasi, melalui pembelajaran (*learning*) dari pengalaman yang telah diperoleh. Pada kebanyakan program, evaluasi ini lebih substansial diarahkan pada terjadinya perubahan antara desain program dan imlementasi, validasi atau penilaian awal terhadap relevansi, efektifitas dan efesiensi. Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi program selesai. Tujuan utamanya adalah untuk menilai keberhasilan suatu program dari sisi desain, manajemen, efektifitas, output, dan dampak. Pada saat ini evaluasi sumatif lebih diutamakan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan program.

Menurut Bingham dan Felbinger dalam Nugroho (2009:478) evaluasi dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Evaluasi proses, yang berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan.
2. Evaluasi *impact*, yang berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.

Menurut Pietrzak, dkk (1995) dalam Maraya (2011), evaluasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi masukan (*input*) berfokus pada beberapa bagian dan masukan program yang dapat mempengaruhi atau memperbaiki kinerja program, sehingga hasil yang diharapkan akan lebih baik.
2. Evaluasi proses (*process*), merupakan pengukuran sebuah lembaga dalam melaksanakan program dan melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen program serta merancang kembali suatu program.
3. Evaluasi hasil (*outcome*), merupakan evaluasi yang menekankan pada dampak program secara keseluruhan pada sasaran dan tujuan program.

Sedangkan menurut Pariata Westra (1983:46-47), ada tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkat-tingkat program, yaitu :

1. Evaluasi Pra-program (*ex-ante evaluation*)
Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau perregion.
2. Evaluasi Tengah Berlangsung (*on going/concurrent evaluation*).
Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tengah waktu itu berjalan dievaluasi.
3. Evaluasi setelah berlangsung (*ex-post evaluation*)
Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu.

Untuk menilai dan mengukur keberhasilan sebuah program diperlukan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan penilaian dan pengukuran sebuah keberhasilan. Dalam bukunya, Dunn (2000:610) mengungkapkan beberapa kriteria dalam evaluasi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi

No.	Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio biaya manfaat
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaiannya hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Seberapa jauh pencapaiannya efektifitas tetap
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda?	Kriteria pareto, kriteria kaldor-Hiks, Kriteria Rawls
5.	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok sendiri?	Konsistensi dengan survey warga negara
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan bernilai

Sumber : William Dunn (2000:610)

Kategori evaluasi menurut Orville F. Poland dalam Soekarno (2005:223), yaitu:

1. *Effectiveness evaluation*, evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program
2. *Efficiency evaluation*, evaluasi terhadap efisiensi pelaksanaan. Evaluasi inilah yang oleh Anderson dimaksudkan dengan melihat pada “*cost-benefit ratio*”.
3. *Eclectic evaluation*, evaluasi yang meneliti pemasukan, proses, kriteria-kriteria hasil kegiatan yang dianggap ada kaitannya dengan hasil program.

Berdasarkan beberapa penjabaran kebijakan diatas, peneliti ingin menggunakan evaluasi hasil atau tujuan setelah pelaksanaan program

berakhir dengan melihat dampak, perubahan dan manfaat dari program yang telah dilaksanakan tersebut.

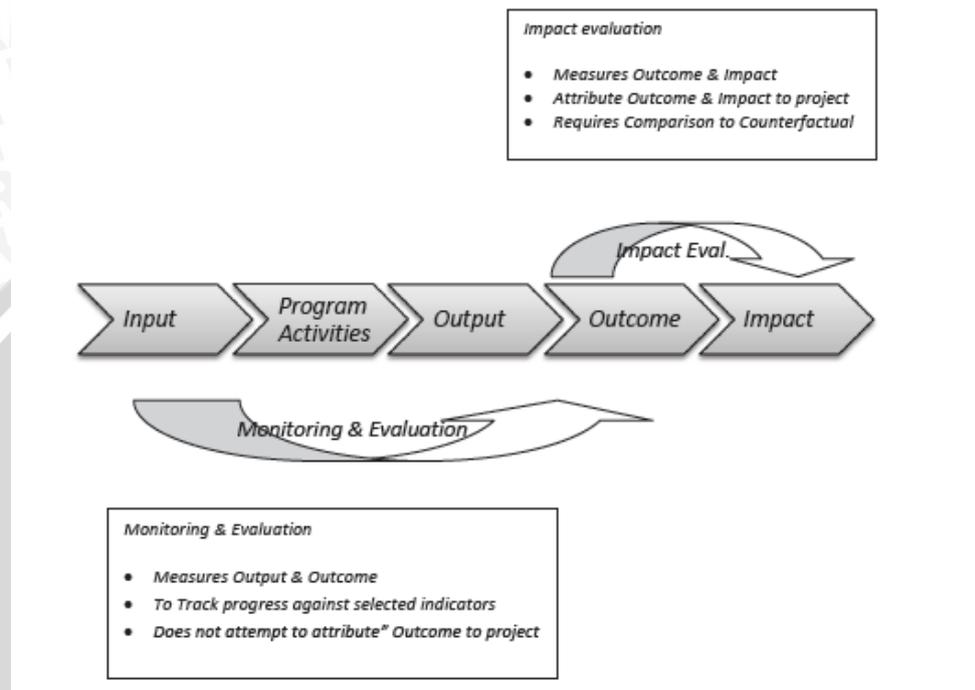
4. Konsep Dasar Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Untuk memahami evaluasi program dengan lebih sistematis maka dibuatlah skema logika program untuk melukiskan berbagai pemahaman hubungan diantara sumber-sumber untuk mengoperasikan program, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, dan perubahan atas hasil yang diharapkan akan terjadi. Logika program juga biasa disebut sebagai Model Evaluasi Sistem Analisis (*System Analisis Evaluation Model*) atau Teori

Umum Sistem (*General System Theory*) yang dikembangkan oleh Karl Ludwig von Bertalanffy dalam Wirawan (2011:107).



Gambar 2.2 Logika program, *Adapted from Gary Woller, 2007 (dalam workshop evaluasi dampak untuk mendukung intervensi sosial berbasis Fakta, Djoko Hartono, Depok : 2011)*

Masukan (*input*) melukiskan sumber-sumber yang diperlukan program. Sumber-sumber meliputi antara lain tenaga, keuangan, dan sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program. Aktivitas adalah proses, peralatan, kejadian-kejadian, teknologi, dan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan program yang disebut juga sebagai intervensi atau perlakuan program. Intervensi inidipakai untuk menimbulkan perubahan. Keluaran (*output*) program merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh

program. Pengaruh (*outcomes*) adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, keterampilan, status, level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan. Pengaruh jangka pendek harus dicapai dalam waktu 1-3 tahun, sedangkan pengaruh jangka panjang harus dicapai 4-5 tahun. Akibat (*Impact*) adalah perubahan yang diharapkan atau tidak yang diharapkan yang terjadi dalam organisasi, masyarakat atau sistem sebagai hasil dari aktivitas program. Evaluasi Program Menurut Sutisna (2000:250) bahwa :

“Evaluasi program adalah unsur lain yang penting dari keseluruhan proses pengelolaan kegiatan. Evaluasi program, pada umumnya berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Evaluasi program adalah proses yang menentukan betapa baiknya organisasi, program-program atau kegiatan-kegiatan sedang atau telah mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Dengan kata lain evaluasi program adalah membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dengan yang dikehendaki dan merumuskan pendapat tentang perbuatan organisasi dan anggotanya didasarkan pada perbandingan itu”.

Aktivitas mengevaluasi program sangat diperlukan pertimbangan yang sistematis, rencana, analisis sebab akibat, penyusunan instrument evaluasi, penyusunan kriteria, serta deskripsi program dengan jelas. Pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan, terutama untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program.

Menurut Sudjana (2006:17) evaluasi program sering disalah artikan dan dianggap kegiatan yang mencari kesalahan atau kelemahan program, seorang atau sekelompok pelaksana program. Evaluasi program bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik dan buruknya suatu program karena

kegiatan tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. Menurut Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2004:14) evaluasi program adalah sebagai berikut :

“Proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standart tertentu yang telah dibakukan”.

Sedangkan menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Arikunto dan Jabar (2004:4) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambilan keputusan. Menurut pedoman evaluasi yang diterbitkan Direktorat Ditjen PLS Depdiknas (2002:2) memberikan pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci lagi, definisi evaluasi program menurut *Word bank* (2004) dalam Iskandar (2012) adalah suatu kegiatan penilaian yang sistematis dan obyektif mungkin terhadap suatu obyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau telah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya, tujuan dari evaluasi program adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutannya, dimana suatu evaluasi harus memberikan

informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak yang menerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan. Evaluasi merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk menilai atau mengukur secara sistematis kelebihan maupun kelemahan suatu program dan memutuskan apakah program layak dilanjutkan atau diperbaiki.

Selanjutnya menurut Worthen dan Sanders (1973) dalam Sudjana (2006:20) evaluasi adalah suatu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif keputusan. Dari beberapa penjabaran tentang konsep evaluasi program dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan sebuah proses yang dilaksanakan untuk memberikan informasi dan nilai pada suatu pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah dengan membandingkan antara tujuan dan hasil yang diperoleh, atau dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk mengukur dan melihat kelemahan dan keunggulan dari suatu program tetapi juga melihat hasil dan dampak yang diterima oleh pemanfaat program, sehingga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan program selanjutnya program dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Menurut Sutisna (2000:252) fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program, sehingga pembinaan program tersebut dapat mengambil

keputusan yang tepat, apakah program tersebut dapat diteruskan, ditunda ataukah dihentikan. Maka dengan demikian evaluasi program merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan sebuah program.

Evaluasi juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program
- b) Menentukan faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program
- c) Menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan program
- d) Memperoleh bahan untuk memberikan saran perbaikan, perubahan, penghentian, dan penyempurnaan program.

5. Evaluasi dari Tinjauan Normatif

Pada Bab III Pengendalian Dan Evaluasi RKPD dalam PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.

Pasal 14

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP Tahun 2015.

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2015.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran V menyebutkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD adalah mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
- f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

6. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara independen untuk menilai proses kegiatan program baik dari aspek efisiensi dan efektifitas kegiatan maupun dampak dari program. Kegiatan evaluasi program

Pamsimas akan mencakup aspek, pelaksanaan dan perubahan yang terjadi setelah adanya program dengan melihat output kegiatan, dan evaluasi dampak program. Evaluasi Program Pamsimas bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan program sehingga memberi kesempatan kepada pelaksanaan program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi dan hasil pemantauan, dengan kata lain evaluasi program berguna untuk melihat apakah intervensi input yang dilakukan telah memberikan dampak sesuai harapan program yang ditetapkan. Jenis-jenis evaluasi yang akan dilakukan dalam Program Pamsimas adalah:

- a) *Evaluasi Keluaran (Output)*. Dilakukan dengan melihat sejauh mana perubahan pada air bersih dan sanitasi masyarakat penerima manfaat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program.
- b) *Studi Dampak*. Program Pamsimas melalui kerja sama dengan konsultan atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat ekonomi, sosial, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setelah adanya program tersebut.

Indikator Keberhasilan Program Pamsimas di Tingkat Masyarakat

Kinerja pelaksanaan program Pamsimas di tingkat masyarakat dinilai berhasil jika memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tujuan umum program
 - a. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, pada fasilitas air minum yang layak sebesar 50-100% dari masyarakat yang belum memiliki akses.
 - b. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, pada fasilitas sanitasi yang layak sebesar 100% paling lambat pada tahun ketiga setelah pemicuan.
2. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal
 - a. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) disusun secara partisipatif melibatkan seluruh komponen masyarakat (miskin-kaya; perempuan-laki-laki).
3. Komponen 2: Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitas
 - a. 80% masyarakat sasaran berhenti buang air besar sembarangan.
 - b. 80% masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun pada waktu-waktu kritis.
 - c. 95% sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak dan program PHBS.
4. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
 - a. Sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat kepuasan mayoritas masyarakat sasaran.

- b. Sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat.

F. Program PAMSIMAS

1. Latar Belakang Program Pamsimas

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yaitu salah satu program nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 6800 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target MDGs, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Program Pamsimas II (WSLIC-3 AF) dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk

terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) Air Bersih untuk Rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas II dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain.) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*)¹. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Ruang lingkup program Pamsimas II mencakup 5 (lima) komponen program: 1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah; 2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4) Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; dan 5) Dukungan manajemen pelaksanaan program.

2. Tujuan

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

3. Sasaran

a. Sasaran Program

Tujuan program Pamsimas tersebut diatas akan tercapai bila sasaran program tersebut dibawah ini, sebagaimana diuraikan dalam *indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator)* Pamsimas, tercapai:

- a) Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan;
- b) Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;

- c) Minimal 50% masyarakat dusun (lokasi Program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- d) Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- e) Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
- f) Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk mencapai MDGs.

b. Sasaran Lokasi

Program Pamsimas diutamakan bagi kabupaten/kota yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan di bawah rata-rata nasional. Pemilihan kabupaten/kota sasaran dilakukan oleh Pemerintah Nasional sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Desa sasaran Pamsimas sedikitnya 5000 desa pada 219 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Secara umum, kriteria desa sasaran Pamsimas terdiri dari:

- 1) Belum pernah mendapatkan program Pamsimas;

- 2) Cakupan akses air minum aman masih rendah;
- 3) Cakupan akses sanitasi aman masih rendah;
- 4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
- 5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien;
- 6) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
 - c. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL) minimal 3 orang;
 - d. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4% in cash dan 16% in kind
 - e. Menghilangkan kebiasaan BABS.

4. Strategi, Pendekatan dan Prinsip

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka diterapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, membangun masyarakat hidup bersih dan sehat
- 2) Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi

- 3) Melalui sharing program APBN dan APBD; dimana dana APBN membiayai BLM untuk sejumlah 80% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, dan APBD wajib membiayai BLM minimal 20% kebutuhan pendanaan desa sasaran.
- 4) Penerapan tiga pilihan pembangunan SPAM pada desa sasaran, sebagai berikut:
 - a) optimalisasi yaitu kegiatan pemulihan SPAM yang tidak/berfungsi sebagian untuk menambah jumlah penerima manfaat.
 - b) pengembangan yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa/kelurahan yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah jumlah penerima manfaat.
 - c) perluasan yaitu kegiatan pembangunan SPAM baru pada desa yang belum memiliki SPAM.
- 5) Penerapan pagu BLM pada tingkat kabupaten/kota; pagu BLM diterapkan di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sesuai dengan usulan target tambahan penerima manfaat program lingkup kabupaten/kota. Alokasi BLM pada setiap desa sasaran Pamsimas II selanjutnya diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi RKM desa/kelurahan.
- 6) Penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); pendekatan STBM diterapkan pada skala kabupaten/kota

dengan pelibatan aktif dan intensif para Sanitarian, Promkes, Puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, dan Fasilitator STBM di tingkat kabupaten/kota.

- 7) Penguatan kelembagaan; penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan sebagai bagian dari fungsi Panitia Kemitraan pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua lembaga/organisasi ini akan tetap terus berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan memfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- 8) Penguatan peran Kader AMPL di perdesaan untuk mampu berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca konstruksi di tingkat masyarakat sampai dengan tahap pemutakhiran informasi/data pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat serta prioritas program air minum dan sanitasi perdesaan pada Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya.

b. Pendekatan

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut :

- 1) Kolaborasi antar kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya program Pamsimas merupakan program bersama antara

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Bappenas berdasarkan tupoksi masing-masing.

- 2) Berbasis Masyarakat; artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
- 3) Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong

c. Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut:

- 1) Berbasis Masyarakat; artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
- 2) Tanggap Kebutuhan; artinya program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

- 3) Partisipatif; artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Pamsimas.
- 4) Kesetaran gender; artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
- 5) Keberpihakan pada masyarakat miskin; artinya program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
- 6) Akses bagi semua masyarakat; artinya program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (*disable*) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 7) Keberlanjutan; artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program;
- 8) Transparansi dan akuntabilitas; artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan

masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;

- 9) Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong.

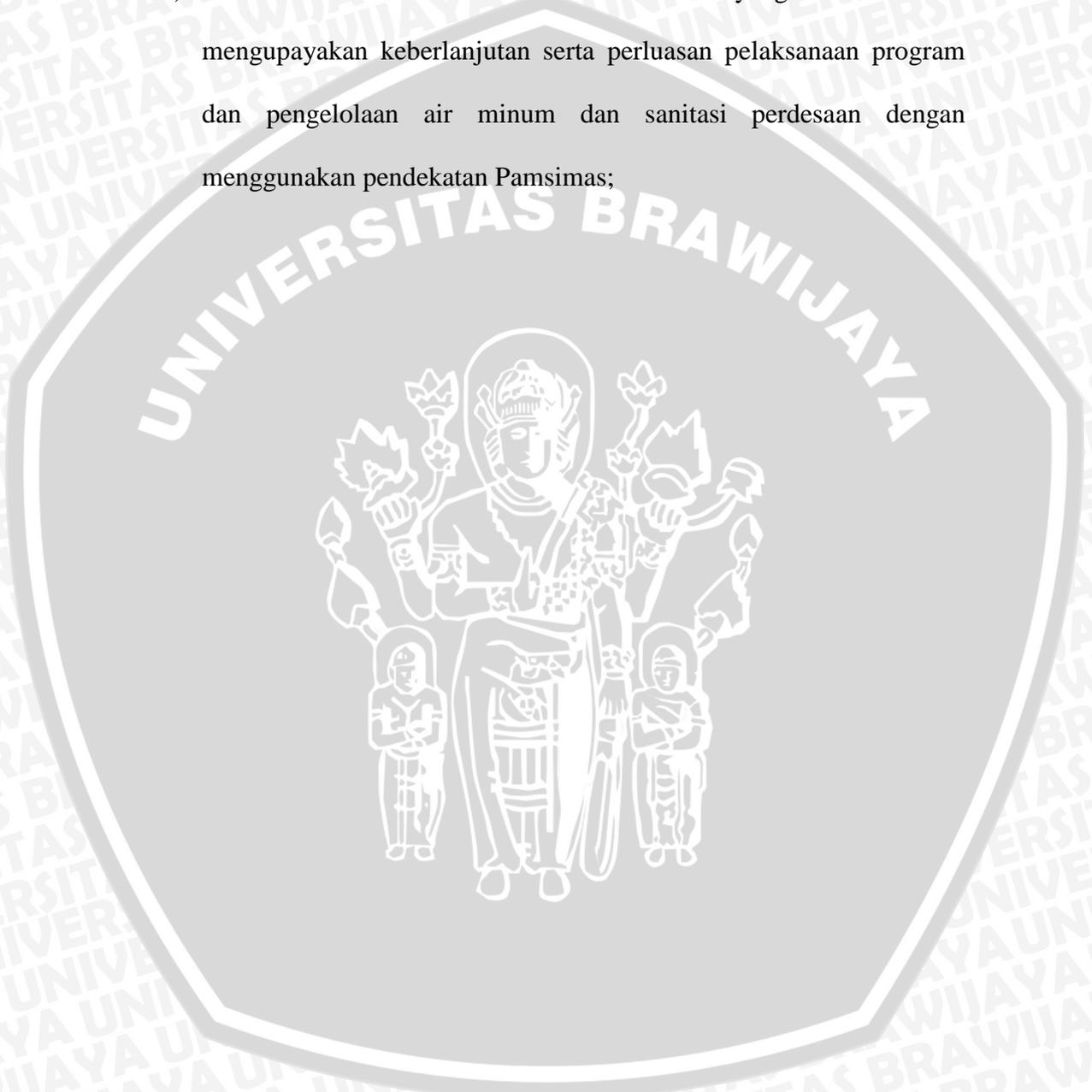
5. Kondisi yang di Arahkan

Strategi, pendekatan dan prinsip dalam Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu:

- 1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersedia meningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, dan sanitasi berkelanjutan yang layak untuk masyarakat di wilayah perdesaan dan pinggiran kota;
- 2) Masyarakat sasaran bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- 3) Masyarakat sasaran memperoleh akses yang berkelanjutan terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang aman, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola keberlanjutan sistem pelayanan secara mandiri dan efektif;
- 4) Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelayanan air

minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas.

- 5) Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Menurut Ruslan (2003:24) metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Disamping itu metode diartikan juga sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan metode mengandung pengertian bahwa cara yang digunakan adalah sistematis dengan beberapa proses yang harus dilalui dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporannya.

Menurut Hillway dalam Nazir (2002:14), penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang berhati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh suatu pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Whitney dalam Nazir (2002:14), menyatakan bahwa disamping untuk memperoleh kebenaran, kerja penyelidikan harus pula dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengetahui dan mendalami suatu fenomena. Dalam penelitian yang merupakan suatu yang dilaksanakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran. Metode penelitian memegang

peranan penting karena dalam penelitian tersebut terdapat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan penelitian mulai dari penetapan variabel penelitian sampai dengan cara menganalisa data yang diperoleh.

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan peraturan, sehingga sesuai data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Berdasarkan judul, rumusan masalah, tujuan yang telah di kemukakan di atas maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang sebagai suatu realitas/gejala/fenomena. Dalam paradigma ini realitas sosial di pandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Metode kualitatif juga sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi.

Metode penelitian kualitatif sering di sebut juga metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci.

Menurut Sugiyono (2011:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat post positivis, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrmen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian

kualitatif peneliti berpartisipasi selama dilapangan, mencatat peristiwa yang terjadi dilapangan, menganalisis berbagai temuan dokumen yang ada dilapangan, serta membuat laporan penelitian secara detail. Hasilnya adalah adapun perubahan, dan dampak-dampak yang terjadi dengan adanya Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat akan di deskripsikan secara jelas sehingga dapat dihasilkan sebuah hasil dan kesimpulan yang diinginkan.

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang di dapat dilapangan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diselidiki. metode kualitatif ini memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Data gejala yang dikumpulkan mula-mula disusun, diuraikan, dianalisis serta selanjutnya menerima alternatif pemecahan masalah tersebut.

Kesimpulannya adalah bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan pemberian dan penggambaran atas suatu fenomena yang di jadikan perhatian dalam suatu uraian sistematis, factual, akurat, dan jelas bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara suatu gejala dengan gejala lainnya didalam masyarakat.

Dari uraian gambaran yang di hasilkan dari data kualitatif sebagaimana yang didefinisikan di atas, di dukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti telaah dan dokumen atau laporan-laporan yang terkait, baik kalimat,

kata atau angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk kata-kata. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini masuk dalam kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian tanpa adanya fokus penelitian, setiap penelitian pasti memiliki fokus penelitian. Salah satu fungsi dari adanya fokus penelitian adalah membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak melebar dan luas. Fokus penelitian juga membuat penelitian tersebut menjadi lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari rumusan masalah yang di tetapkan.

Menurut Moeloeng(2008) fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki landasan sebagai berikut :

1. Suatu penelitian tidak dimulai dari suatu vakum ata kosong.
2. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang di perolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya.
3. Tujuan penelitian adalah pada dasarnya memecahkan masalah yang dirumuskan implikasinya, masalah perlu dirumuskan dahulu, barulah tujuan penelitian ditetapkan.
4. Masalah yang bertumpu pada fokus yang ditetapkan bersifat tentatif atau dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian implikasinya, peneliti tidak perlu kecewa jika masalah dan fokusnya berubah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa peneliti ini bermaksud untuk mengetahui, mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan, perubahan dan dampak dari pada program Pamsimas. Maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), perbandingan antara rencana dengan

output yang dihasilkan. Perbandingan antara rencana dengan *output* yang dihasilkan akan dilihat dari tiga indikator, antara lain: ketersediaan air, anggaran pembangunan dan sarana dan prasarana.

2. *Outcome* yang dihasilkan dari pembangunan sarana dan prasarana dalam Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
3. Dampak Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
 - a. Dampak pada bidang fisik/lingkungan
 - b. Dampak pada aspek ekonomi
 - c. Dampak pada aspek sosial

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian adalah ruang atau tempat peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan, Sedangkan situs penelitian adalah letak dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kediri, dengan situs penelitian pada Masyarakat Pengguna Pamsimas di Desa Tarokan Kabupaten Kediri. Alasan penelitian dilakukan pada lokasi dan situs lokasi tersebut adalah karena diantara desa-desa lain yang mendapatkan program Pamsimas tahun 2014 di Kabupaten Kediri, Desa Tarokan merupakan desa yang dilihat peneliti sesuai dan tepat untuk mendapatkan Pamsimas, karena kondisi geografis dan

masyarakat yang terletak di daerah lereng sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih dan minim akan sanitasi, selain itu dengan jumlah penduduk di Desa Tarokan dapat dikatakan cukup banyak yang belum menggunakan air bersih dan jamban secara layak. Peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis dengan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program pamsimas, dan perubahan serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya program pamsimas tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data penelitian ini. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari semua para pelaku yang terlibat dalam program Pengadaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi, atau alat bantu lainnya. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumbernya yang langsung berhubungan dengan peneliti dan mampu memberikan informasi secara jelas dan valid. Sumber data tersebut antara lain adalah tim evaluasi dari dinas PU, fasilitator pemerintah dan masyarakat dalam program

Pamsimas, masyarakat pengguna Program Pamsimas, dan tim pelaksana program yang di bentuk oleh masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data dapat berupa catatan resmi, dokumen-dokumen, karya tulis ilmiah, paper, makalah ilmiah, serta data pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengmpulan data adalah tahap yang paling penting dalam sebah penelitian ilmiah. Tahap pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik peneliti di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara penggalian teori-teori, dokumen-dokumen atau arsip baik berasal dari literatur maupun dari karangan ilmiah yang berhubungan dengan Program Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, sangat terstruktur, dan individual, ketika seorang responden ditanya pewawancara guna mengungkapkan perasaan, motivasi, sikap atau keyakinan, terhadap suatu topik.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur agar lebih mudah dalam mendapatkan informasi, dengan wawancara terstruktur

setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan beberapa instrument antara lain adalah perekam suara, kamera, buku catatan dan lainnya.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara jelas terhadap obyek yang di teliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati perubahan yang terjadi pada masyarakat. Perubahan tersebut antara lain perubahan kondisi sanitasi sebelum dan sesudah adanya program tersebut.

Beberapa manfaat dari observasi menurut Patton dalam Nasution (1988)

Dalam Sugiyono(2011:67-68) menyatakan manfaat observasi sebagai berikut :

- a) Dengan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- b) Dengan observasi maka akan di peroleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan permainan atau *discovery*.
- c) Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dank arena itu tidak akan terungkap dengan wawancara.
- d) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang seandainya tidak terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- e) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan ketika peneliti pada proses pengumpulan informasi di lapangan, instrumen data juga sangat mempengaruhi hasil data yang di dapat. Adapun instrumen penelitian dalam memperoleh data dan pengumpulan data antara lain:

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data yang utama, yakni dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang di kemukakan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011:60) menyatakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya adalah segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Hal ini penting mengingat berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data seperti wawancara.
3. Beberapa perangkat penunjang lain, meliputi catatan lapang, alat tulis dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Karena analisis data di dalamnya terdapat kemampuan untuk menganalisis, mendiskripsikan data, peristiwa, konsepsi yang merupakan

bagian dari obyek penelitian. Dalam singarimbun (1989:263) mengatakan bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Menurut Moleong (2006:247) Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah di tulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sedangkan menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) berikut analisis data model interaktif:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data, diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus menerus selama penelitian. Bahkan sebenarnya kondensasi dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian, data dilapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dilapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

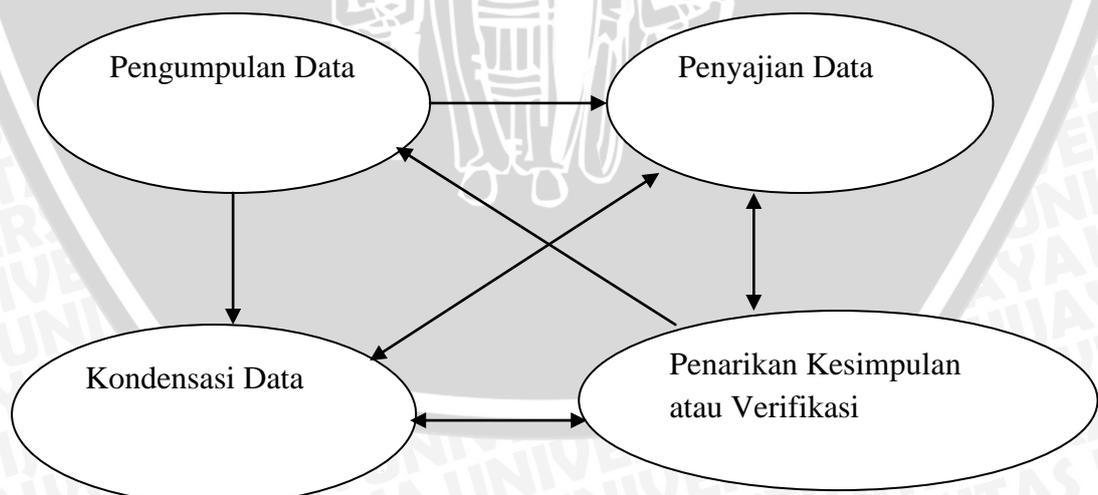
Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan melihat penyajian-penyajian data, maka dapat diketahui dan dipahami apa yang sedang terjadi dan dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan analisis berdasarkan penyajian-penyajian data tersebut. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks uraian atau naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid.

Tahap-tahap dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana dapat dilihat dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif
(Miles, Huberman & Saldana, 2014:31-33)

BAB IV

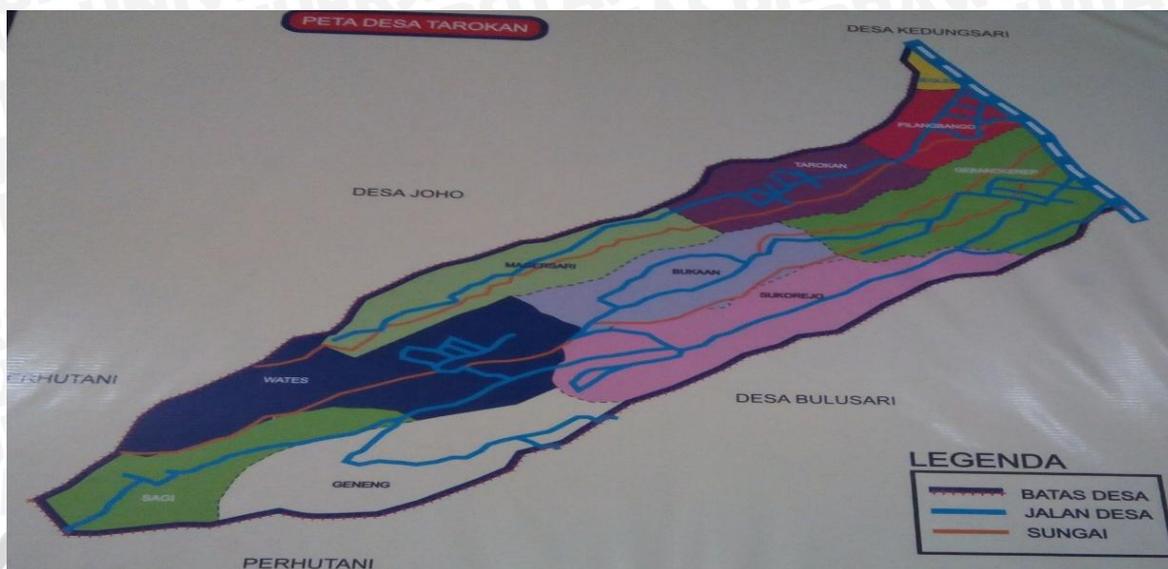
PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Profil Desa

Desa Tarokan yang terletak paling barat dari Kabupaten Kediri yang berbatasan dengan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu desa dari 10 desa di wilayah Kecamatan Tarokan, yang berjarak kurang lebih 1 km dari kantor Kecamatan Tarokan dengan kantor kabupaten berjarak kurang lebih 17 km dan dengan kantor propinsi kurang lebih 100 km.

Desa Tarokan dilihat dari topografi dan kontur tanah secara umum dataran dan perbukitan berada pada ketinggian kurang lebih 750-775 dari permukaan laut dengan suhu udara diperkirakan antara 22°C – 28°C , dengan curah hujan antara 1114-2000 mm/th dengan kemiringan tanah antara 0° – 15° . Desa Tarokan terdiri dari 10 dusun, antara lain yaitu dusun Magersari, Tarokan, Pilangbangu, Jegles, Gebangkerep, Wates, Sukorejo, Bukaan, Sagi, dan Geneng. Dari 10 dusun tersebut diatas sebagian besar dusun terletak pada dataran tinggi dan merupakan daerah pegunungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Desa Tarokan di bawah ini:



Gambar 4.1 Peta Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri

(Sumber : Kantor Desa Tarokan)

Berdasarkan gambar peta di atas juga dapat dilihat batas-batas wilayah dari Desa Tarokan. Desa Tarokan memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tarokan

Uraian	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kedungsari	Tarokan
Sebelah Selatan	Tanah Perhutani	Tarokan
Sebelah Timur	Bulusari	Tarokan
Sebelah Barat	Joho	Pace, Nganjuk

Sumber : Profil Desa Tarokan

Desa Tarokan memiliki luas wilayah kurang lebih 976.000 hektar. Dimana dari total luas wilayah yang ada tersebut merupakan 232 Ha tanah sawah dan 975.768 Ha Tanah darat (wilayah pemukiman, wilayah pemakaman umum, pekarangan, perkantoran, dan prasarana umum lainnya).

2. Jumlah Penduduk

Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri merupakan salah satu desa yang cukup padat penduduknya di banding dengan desa-desa lain di Kecamatan Tarokan. Dimana jumlah penduduk yang mencapai 13.024 jiwa yang terdiri dari 6.437 jiwa penduduk laki-laki dan 6.587 jiwa penduduk perempuan dan 3.968 kepala keluarga (KK). Untuk lebih rinci dan jelasnya dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per dusun sebagai berikut

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Per Dusun

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Magersari	220	223	443
2.	Tarokan	562	629	1.191
3.	Pilangbangu	942	982	1.924
4.	Jegles	308	304	612
5.	Gebangkerep	1.530	1.501	3.031
6.	Wates	735	721	1.456
7.	Sukorejo	694	670	1.364
8.	Bukaan	299	280	579
9.	Sagi	288	314	602
10.	Geneng	859	963	1.822
TOTAL		6.437	6.587	13.024

Sumber : Data Hasil Transect Walk – IMAS 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang lebih banyak adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan, dan jumlah penduduk paling padat berada di dusun gebangkerep, dengan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 3.031 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	801
2.	60 – 65	756
3.	55 – 60	871
4.	50 – 55	816
5.	45 – 50	969
6.	40 – 45	1.028
7.	35 – 40	1.157
8.	30 – 35	1.123
9.	25 – 30	1.063
10.	20 – 25	1.425
11.	15 – 20	902
12.	10 – 15	981
13.	5 – 10	771
14.	< 5	361
Jumlah		13.024

Sumber : RPJMDES 2015-2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut umur di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Dari umur < 5 tahun sampai > 60 tahun, jumlah penduduk paling banyak pada usia remaja yaitu antara 20-25 tahun yang berjumlah 1.425 dan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu pada usia balita <5 tahun yang berjumlah 361. Penduduk Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri selain dilihat dari jumlah penduduk menurut umur, maka dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan masyarakat. Jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tarokan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Sekolah/ Buta Huruf	225
2.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	556
3.	Tamat SD/ Sederajat	2.363
4.	Tidak Tamat SLTP/ Sederajat	3.340
5.	Tamat SLTP/ Sederajat	1.421
6.	Tamat D1,D2,D3	276
7.	Sarjana / S1	192

Sumber : RPJMDES 2015-2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tarokan dilihat dari tingkat pendidikannya sebagian besar masyarakat tidak tamat SLTP/ sederajat dengan jumlah 3.340 orang. Jumlah penduduk di Desa Tarokan selain dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah penduduk juga dapat dilihat dari mata pencahariannya.

Desa Tarokan merupakan desa pertanian dan perdagangan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan berdagang, untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	4.069
2.	Pedagang	3.598
3.	Industri	249
4.	Pegawai Negeri Sipil	150
5.	Peternak	1.257
6.	Montir	100
7.	Karyawan swasta	700
8.	Transportasi / Sopir	250
9.	Tukang/ Konstruksi	206
10.	Pensiunan	75
11.	Belum Bekerja	1.001
Jumlah		13.024

Sumber : RPJMDES 2015-2020

B. PROGRAM PAMSIMAS

1. Pelaksanaan Program PAMSIMAS

Di dalam GBHN tahun 1999-2004 ditegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Bangsa yang mandiri dan sejahtera dapat diartikan mempunyai pemberdayaan yang kuat, oleh karena itu pembangunan harus berlandaskan pada kemampuan rakyat sendiri serta berorientasi pada pengendalian dan pembangunan sumberdaya masyarakat.

Pembangunan yang mandiri dan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan, untuk dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Dalam rangka berfikir pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu menciptakan kemungkinan agar potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dan pemberdayaan juga mengandung arti melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.

Dalam konteks ini pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, kementerian pekerjaan umum mengembangkan program

pemberdayaan masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program Pamsimas merupakan program yang di selenggarakan dengan tujuan secara lebih spesifik untuk membantu pembangunan suatu daerah sesuai dengan kebutuhan yaitu dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan mencapai sasaran prioritas nasional. Dalam program pamsimas ini lebih berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat dalam hal pemenuhan sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Dalam penelitian ini membahas mengenai Desa Tarokan yang pada Tahun 2014 mendapatkan program Pamsimas dalam pelaksanaannya kementerian pekerjaan umum telah mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan program pamsimas. Dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan telah dijelaskan bahwa pelaksanaan program Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dilakukan melalui tiga pilihan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu perluasan (penyediaan SPAM), pengembangan, dan optimalisasi. Komponen ini bertujuan untuk menambah jumlah penerima manfaat akses air minum dan sanitasi yang layak.

Komponen ini menyediakan pilihan teknis terhadap penyediaan prasarana air minum dan sanitasi. Sarana sanitasi yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana penunjang perubahan PHBS yang disediakan pada fasilitas umum, seperti sekolah dasar, puskesmas pembantu (pustu), dan posyandu/polindes. Setiap pilihan prasarana dilengkapi dengan penjelasan aspek keuntungan dan

kerugiannya. Masyarakat yang sudah diberdayakan, dapat menentukan jenis prasarana, melaksanakan perencanaan dan pembangunan fisik, serta dapat mengelola operasional dan pemeliharaan prasarana yang akan dibangun.

Peningkatan pelayanan air minum dilakukan baik melalui pembangunan sistem pelayanan air minum dan sanitasi (SPAM) baru, pengembangan SPAM (baik unit air baku, atau unit pengolahan, atau unit distribusi, atau unit layanan) untuk meningkatkan cakupan pelayanan, maupun melalui optimalisasi sarana dan prasarana air minum yang mengalami kerusakan ataupun yang tidak lagi berfungsi yang memungkinkan masyarakat miskin, kaum perempuan, masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok marginal lainnya untuk memperoleh pelayanan air minum dalam jumlah yang memadai, kualitas yang memenuhi standar kesehatan, kontinu, dan mudah dijangkau.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi dalam program Pamsimas didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat setempat dan pilihan prasarana dan sarana yang diinformasikan (*informed choice*). Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek, seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, sosial dan budaya serta kelembagaan pengelolaan.

Dalam kaitannya dengan pilihan teknologi, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah:

- 1) Ketersediaan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan;
- 2) Jumlah biaya yang dibutuhkan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memberikan kontribusi pembangunan;

- 3) Kompleksitas teknologi dan kesiapan masyarakat untuk mengelola SPAMS dengan teknologi yang ada;
- 4) Nilai manfaat, kemudahan, dan kesinambungan penggunaan terhadap opsi teknis yang dipilih.

Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi didasarkan pada usulan yang diajukan dan disepakati oleh masyarakat secara partisipatif dalam bentuk usulan/proposal desa/kelurahan. Seleksi usulan/proposal desa/kelurahan mengacu pada efektifitas biaya pembangunan per penerima manfaat sesuai dengan kondisi setempat, dengan tetap mempertimbangkan pilihan teknologi dan kebutuhan yang bersifat lokal/spesifik pada desa/kelurahan tersebut.

Seperti telah dijelaskan, kegiatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi program Pamsimas di suatu desa akan berbeda tergantung kondisi desa yang akan mengikuti program, dimana terdapat tiga jenis pilihan penanganan SPAMS, sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Perluasan**, yaitu kegiatan pembangunan system penyediaan air minum (SPAM) untuk desa yang belum/mempunyai pelayanan air minum dan sanitasi rendah.
- 2) **Kegiatan Pengembangan**, yaitu kegiatan untuk menambah pemanfaat sistem air minum dan sanitasi yang ada melalui pengembangan sarana dan kinerja BP- SPAMS.

- 3) **Kegiatan Optimalisasi**, yaitu kegiatan yang diperuntukan bagi desa yang sudah mempunyai sistem pelayanan SPAMS namun mengalami kerusakan yang berakibat sistem tidak berfungsi atau berfungsi sebagian.

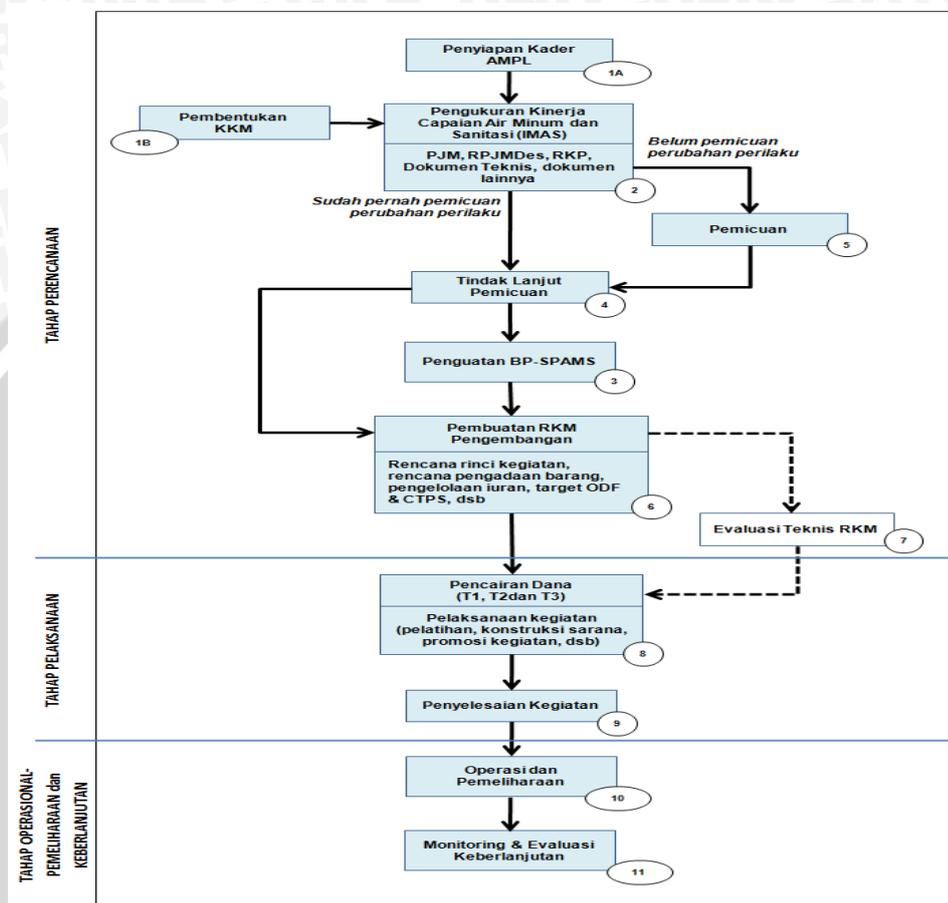
Pemilihan desa lokasi sasaran Pamsimas II didasarkan pada proposal desa yang disampaikan oleh calon desa sasaran. Penyusunan proposal desa harus berbasis pada data real kondisi air minum dan sanitasi di desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum Tim Penyusun Proposal menyusun proposal maka Tim Kader AMPL bersama masyarakat perlu melakukan kajian awal kondisi masyarakat serta kondisi air minum dan sanitasi desa. Kajian awal dilakukan dengan menggunakan tools MPA. Adapun tools MPA yang digunakan dalam kajian awal di masing-masing desa secara:

- a) Inventaris Data Komunitas
- b) Alur Sejarah Pengembangan Sarana Air Minum dan Sanitasi, serta Kesehatan
- c) Klasifikasi Kesejahteraan
- d) Pemetaan Sosial
- e) Rapid Technical Assessment
- f) Tinjauan Pengelolaan Pelayanan – Pengelolaan Keuangan

Desa tarokan dalam program PAMSIMAS II Tahun 2014 ini merupakan jenis kegiatan pengembangan. dimana menurut buku pedoman pelaksanaan program pamsimas perencanaan kegiatan dan pelaksanaan dari jenis kegiatan pengembangan sebagai berikut:

Siklus Kegiatan Pamsimas di Desa Pengembangan

Secara ringkas kegiatan pengembangan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2 Tahapan Kegiatan Pengembangan Pembangunan SPAMS

Sumber : Buku Pedoman Pengelolaan Pamsimas 2013

Dari gambar tahapan kegiatan pengembangan pembangunan SPAMS di atas dapat dilihat bahwa dalam tahap kegiatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi ini melalui tiga tahap, pertama merupakan tahap perencanaan dimana dalam tahap perencanaan ini terdapat 7 langkah pembangunan yaitu peniapan kader AMPL, pengukuran capaian akses air minum dan sanitasi, pemicuan dan tindak lanjut pemicuan perubahan perilaku masyarakat, penguatan/pembentukan KKM, dan yang terakhir penyusunan



RKM, pengajuan dan evaluasi RKM. Tahap kedua dalam kegiatan pembangunan ini adalah pada tahap pelaksanaan yang terdiri dari dua langkah yaitu tahap pencairan dana BLM (pelaksanaan kegiatan RKM) dan penyelesaian kegiatan. Pada tahap terakhir adalah tahap operasional pemeliharaan dan keberlanjutan yang terdiri dari dua langkah yaitu operasi dan pemeliharaan, dan monitoring evaluasi keberlanjutan. Untuk lebih jelasnya dalam perencanaan kegiatan pengembangan dapat dilihat sebagai berikut :

1) Penyiapan Kader AMPL

Seperti halnya pada desa perluasan kegiatan pertama untuk desa pengembangan adalah penyiapan Kader AMPL. Langkah-langkah penyiapan kader ini sama dengan pada desa perluasan.

2) Pengukuran Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi

Dasar perencanaan kegiatan pengembangan SPAMS adalah hasil pengukuran capaian akses air minum dan sanitasi yang menggunakan beberapa tool MPA, termasuk kajian dokumen perencanaan yang memuat bidang AMPL. Pengukuran pencapaian akses air minum dan sanitasi adalah kegiatan untuk melihat dan mengkaji ulang semua dokumen perencanaan program air bersih dan sanitasi yang ada di desa untuk dijadikan pertimbangan program pengembangan agar sesuai dengan perencanaan desa secara menyeluruh. Dokumen perencanaan ini dapat berupa PJM-Proaksi, RKP Desa, RPJM Desa atau Rencana Kerja dari Badan Pengelola Air Minum di desa yang bersangkutan.

Kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan adalah hasil tinjauan ulang terhadap pencatatan teknis yang ada maupun perencanaan teknis yang dibuat berdasarkan keadaan sekarang. Di samping itu, perencanaan harus didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan, yaitu potensi sumber air, masyarakat pemanfaat jaringan dan kemampuan pengelolaan oleh masyarakat sendiri.

3) Pemicuan dan Tindak Lanjut Pemicuan Perubahan Perilaku Masyarakat

Pelaksanaan pemicuan masyarakat dengan pendekatan *community led total sanitation* (CLTS/ sanitasi total yang dipimpin oleh masyarakat) yang dilakukan pada desa pengembangan dapat berupa pemicuan lanjutan untuk meningkatkan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi tidak di sembarang tempat, disamping proses pemicuan baru, sehingga sebelum pelaksanaan pemicuan dilaksanakan di desa/kelurahan yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan kajian terhadap proses pemicuan sebelumnya, sehingga dapat diketahui permasalahan mengapa proses pemicuan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan kajian hasil pemicuan dan pemicuan dilakukan oleh tim CLTS kabupaten/kota, yang terdiri Sanitarian/Tenaga Promkes, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, serta Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang telah mendapat pelatihan CLTS.

Kegiatan tindak lanjut pemicuan ini adalah kegiatan lanjutan untuk desa yang sebelumnya telah dilakukan pemicuan CLTS. Tindak lanjut

pemicuan berbentuk pendampingan secara terus menerus untuk memperluas dampak pemicuan sampai terjadinya bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat (Stop BABS), tidak saja di tingkat dusun tetapi meliputi seluruh desa.

Temuan-temuan penting dari pelaksanaan kajian pemicuan CLTS akan dijadikan masukan pada proses perencanaan kegiatan pada RKM-Pengembangan.

- 4) Penguatan atau Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dan Badan Pemberdayaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS).

KKM/Satlak dalam program Pamsimas akan memainkan peran pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, dan BPSPAMS pada tahap pengelolaan pasca program, maka kedua lembaga ini harus dipersiapkan dengan baik agar mampu menjalankan perannya tersebut. Pada desa pengembangan mungkin akan ditemukan KKM/BKM dan BPSPAMS yang telah dibentuk oleh masyarakat.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan KKM masih menjalankan peran dan fungsinya, dan melakukan pengukuran terhadap kinerja BPSPAMS yang ada, dimana dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui kualitas kinerjanya sebagai dasar untuk melakukan penguatan kepada BPSPAMS. Jika ditemukan bahwa KKM sudah tidak ada lagi maka perlu dibentuk kembali. Selain itu, BPSPAMS sedapat mungkin melibatkan kaum perempuan dan masyarakat miskin karena

mereka merupakan pengguna utama, tanpa mengorbankan keahlian yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan dan keberlanjutan program, selain itu harus pula dipastikan telah dibentuk melalui proses yang partisipatif.

Temuan-temuan penting terhadap KKM dan pengukuran terhadap kinerja BPSPAMS ini dijadikan masukan pada proses perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan KKM dan BPSPAMS pada RKM.

5) Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

Penyusunan RKM dilakukan berdasarkan kumpulan pilihan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran capaian air minum dan sanitasi. Proses pemilihan kegiatan ini merupakan tanggung jawab KKM dan Satlak dengan pendampingan oleh Kader, FM dan Sanitarian, dimana KKM/BPSPAMS memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai opsi kegiatan yang dapat dipilih untuk kegiatan Pamsimas dalam RKM. Proses ini dilakukan dalam pertemuan-pertemuan informal dengan kelompok-kelompok masyarakat di seluruh dusun/RW. Pada pertemuan tersebut yang terpenting adalah masyarakat sadar bahwa mereka punya pilihan dan paham dengan konsekuensi atas pilihan yang akan diambil. Kegiatan yang dapat dipilih yaitu:

a) Jenis kegiatan Pembangunan Air Minum

Kegiatan Pengembangan Pembangunan Sarana Air Minum

Setelah keadaan sarana air minum yang ada saat ini diketahui, masyarakat dengan pendampingan dari TFM memilih jenis sarana air minum yang ingin dikembangkan dan hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan konstruksinya.

b) Jenis kegiatan mendukung PHBS

1) Opsi Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Sekolah

Masyarakat dengan pendampingan TFM dan Sanitarian melakukan pemilihan opsi sarana sanitasi dengan menggunakan Katalog Informasi Pilihan⁹ untuk Sarana Sanitasi. Pemilihan opsi sarana sanitasi tersebut harus mempertimbangkan juga antara lain: biaya konstruksi, ketersediaan lahan untuk konstruksi, serta biaya operasional dan pemeliharaan. Sarana sanitasi ini hanya dapat dibangun pada sekolah dasar/ sederajat yang berada di wilayah desa atau kelurahan.

2) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Hasil kajian yang diperoleh dari kegiatan pemicuan dengan CLTS yang telah dilakukan dapat diketahui berbagai perilaku tidak bersih dan tidak sehat yang masih terjadi di masyarakat, sehingga kemudian dapat didiskusikan oleh masyarakat dengan difasilitasi TFM mengenai cara untuk mengubah dan meningkatkannya. Usaha-usaha untuk meningkatkan perubahan perilaku tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan peningkatan PHBS yang akan dimasukkan ke dalam RKM.

c) Jenis kegiatan Pelatihan

1) Kegiatan Pelatihan Masyarakat untuk Pelaksanaan Program

Setelah masyarakat memutuskan pemilihan sarana air minum yang ingin dikembangkan, kemudian dibuat suatu rencana pelatihan di tingkat masyarakat. TFM mendampingi masyarakat dalam mendiskusikan jenis pelatihan yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan sarana air minum dan tatacara pengelolaan administrasinya.

2) Kegiatan Pelatihan Masyarakat untuk Pengelolaan dan Pemeliharaan

RKM juga akan mendanai pelatihan bagi BPSPAMS sebagai organisasi yang akan menjaga keberlanjutan sarana dan melanjutkan kegiatan promosi kesehatan pada tahap pasca program. Untuk itu perlu dirancang suatu kegiatan pelatihan untuk memperkuat BPSPAMS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Setelah masyarakat menyepakati prioritas atau pilihan kegiatan yang akan dilakukan dalam program, KKM dan BPSPAMS bersama-sama dengan masyarakat dan didampingi oleh FM berkewajiban menyusun dokumen RKM. Pada saat penyusunan RKM, masyarakat dan TFM mendapatkan bantuan/dukungan teknis dari Konsultan Kabupaten/Kota. Jenis kegiatan dan sumber biaya RKM dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Setiap desa akan mendapat pembiayaan dari APBD dan kontribusi masyarakat atau APBN dan kontribusi masyarakat.

Tabel 4.6 Jenis Kegiatan RKM dan Sumber Data pada Kegiatan Pengembangan

No	Kegiatan	Sumber Dana	
		Hibah BLM	Kontribusi
1.	Operasional KKM (pembiayaan 2 s/d 4% dari Nilai RKM)	Hibah BLM (bantuan langsung masyarakat) dari APBN dalam belanja bantuan sosial, 80%	1. <i>in-kind</i> 16% 2. <i>in-cash</i> 4%
2.	Pelatihan untuk pelaksanaan program: a. Pelatihan administrasi dan keuangan b. Pelatihan teknis sarana air minum dan sanitasi		
3.	Pengembangan sarana air minum Pembangunan sarana sanitasi sekolah dasar		
4.	Peningkatan PHBS (SBS dan CTPS) Pemeriksaan kualitas air		
5.	Pelatihan untuk pengelola dan pemeliharaan		
TOTAL		80%	<input type="checkbox"/> 20%

Sumber : Buku Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas 2013

Setelah KKM dan BPSPAMS bersama masyarakat dengan bantuan TFM menyusun dokumen RKM, maka draft RKM tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui suatu pertemuan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memberikan ulasan terhadap draft RKM yang telah disusun untuk diperbaiki, sebelum dikirim kepada Pokja AMPL/Pakem. Sebelum RKM diajukan kepada Pakem, RKM tersebut harus diperiksa oleh Koordinator Kabupaten (Konsultan Kabupaten) untuk menjamin kualitas perencanaan dan kelengkapan dokumen yang akan dievaluasi.

6) Pengajuan dan Evaluasi RKM

Proses evaluasi, persetujuan dan pengesahan RKM sama dengan pada RKM untuk desa perluasan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

1) Tahapan Pencairan Dana BLM

Sumber pendanaan (BLM) untuk kegiatan RKM Desa Pengembangan dapat berasal dari APBN atau APBD. Penyaluran dana BLM APBN/APBD dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, Tahap I sebesar 20% dan Tahap II dan III sebesar masing-masing 40%. Mekanisme penggunaan dana, pembukuan penggunaan dana dan pertanggung jawaban pengelolaan dana menggunakan prinsip dan prosedur yang sama seperti yang telah dijelaskan terdahulu

2) Pelaksanaan Kegiatan RKM

a) Pelatihan untuk Pelaksanaan Program

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program dapat dicapai melalui pelaksanaan pelatihan. Pelatihan untuk tahap pelaksanaan konstruksi air minum yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar mampu dan terampil dalam melakukan kegiatan yang tertuang di dalam RKM.

Materi pelatihan untuk pelaksanaan program antara lain tentang konstruksi sarana air minum, dan pembukuan dan pengelolaan keuangan program. Kegiatan pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sarana.

b) Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Sekolah

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan setelah pencairan dana dari RKM dan setelah dilaksanakan pelatihan bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Pembangunan konstruksi sarana oleh masyarakat memanfaatkan sumberdaya yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu kontribusi masyarakat baik dalam bentuk uang tunai minimal 4% maupun natura (tenaga kerja, material lokal, dan sebagainya) minimal 16%, serta melalui sumber pendanaan dari Rekening KKM atau BPSPAMS. Pada tahap ini FM berkewajiban untuk mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Selain kegiatan pembangunan konstruksi sarana, pelaksanaan kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (P-DTA) dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan yang dapat langsung memberi perlindungan dan pelestarian di sekitar sumber air maupun daerah yang tidak langsung diambil sumbernya.

KKM dan masyarakat dengan dukungan FM, secara terus menerus melakukan monitoring kemajuan pembangunan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti pengadaan material/bahan, mutu pekerjaan, pengelolaan administrasi keuangan, dan lain sebagainya, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah bila terjadi penyimpangan.

c) Peningkatan/Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Promosi Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi dalam Program Pamsimas difokuskan pada kegiatan perubahan perilaku Stop BABS dan CTPS. Kegiatan promosi kesehatan dapat dilakukan antara lain dengan membuat media promkes, lomba kesehatan, dan lain-lain. Pemeriksaan kualitas air.

d) Pelatihan untuk Pengelolaan dan Pemeliharaan

Peningkatan kapasitas bagi unit kerja teknis air minum dan unit kerja kesehatan dalam BPSPAMS sangat diperlukan dalam rangka menjamin terwujudnya keberlanjutan pengelolaan penyediaan air minum dan sanitasi. Untuk itu, BPSPAMS, dan individu atau lembaga terkait baik dari dalam maupun luar desa/kelurahan perlu terlibat dalam pelatihan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan kegiatan kesehatan lainnya.

3) Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Tahap penyelesaian pelaksanaan kegiatan pengembangan sama dengan kegiatan perluasan.

2. Kondisi Umum dan Permasalahan

Desa tarokan merupakan salah satu desa di kabupaten Kediri yang mendapatkan program PAMSIMAS karena didesa ini belum pernah dibangun sarana air minum. Proyek pengembangan jaringan dari program WESLIC baru masuk di beberapa RT namun itu pun tidak semua warga mampu, dan hanya sebagian kecil yang sudah terlayani air bersih. Sumber air bersih yang

digunakan adalah dari mata air yang ada di perbukitan. Namun air sering kering apalagi saat musim kemarau, pada saat musim penghujan kualitas air juga keruh, sehingga tidak layak untuk di konsumsi. Penggunaan sarana air minum yang tidak layak seringkali dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh air, dari penyakit kulit hingga penyakit diare. Hasil identifikasi masalah air bersih dan masalah sanitasi seperti ini maka di Desa Tarokan di perlukan adanya kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan sangat memerlukan adanya sarana air bersih yang layak melalui kegiatan perluasan SPAMS desa.

Pada umumnya masyarakat di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebagian besar penduduknya termasuk dalam kategori miskin. Dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan data jumlah penduduk Desa Tarokan yang telah dikelompokkan perdusun sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan (KK)			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kaya	Menengah	Miskin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Magersari	220	223	443	23	35	59	117
2.	Tarokan	562	629	1.191	68	102	171	341
3.	Pilangbangu	942	982	1.924	148	222	372	742
4.	Jegles	308	304	612	33	50	86	169
5.	Gebangkerep	1.530	1.501	3.031	117	266	444	827
6.	Wates	735	721	1.456	90	135	225	450
7.	Sukorejo	694	670	1.364	79	119	200	398
8.	Bukaan	299	280	579	32	49	83	164
9.	Sagi	288	314	602	39	59	99	197
10.	Geneng	859	963	1.822	100	150	253	503
TOTAL		6.437	6.587	13.024	729	1.187	1.992	3.908

Sumber : Data Hasil Transect Walk – IMAS 2014

Dari tabel di atas jumlah penduduk menurut klasifikasi kesejahteraan dapat disimpulkan bahwa dari seluruh dusun yang ada, jumlah rumah tangga dengan klasifikasi kesejahteraan yang termasuk dalam golongan miskin merupakan mayoritas penduduk yaitu dengan jumlah sebanyak 1.992 kepala keluarga (KK).

Sebelum di rencanakan sebuah pembangunan air minum, maka perlu melihat jumlah penduduk dan kepemilikan akses terhadap sanitasi dan air minum. Jumlah penduduk dan akses terhadap air minum dan sanitasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk dan Akses Terhadap Sarana Air Minum dan Sanitasi Berdasarkan Hasil IMAS

No	Dusun	Jumlah		Jumlah Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Sesuai Hasil IMAS	
		Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (KK)	Sarana Air Minum (KK)	Sarana Sanitasi (KK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Magersari	443	117	45	37
2.	Tarokan	1.191	341	298	277
3.	Pilangbangu	1.924	742	352	284
4.	Jegles	612	169	145	116
5.	Gebangkerep	3.031	827	456	378
6.	Wates	1.456	450	189	145
7.	Sukorejo	1.364	398	185	172
8.	Bukaan	579	164	156	146
9.	Sagi	602	197	91	82
10.	Geneng	1.822	503	224	213
TOTAL		13.024	3.908	2.141	1.850

Sumber : Data Hasil Transect Walk – IMAS 2014

Desa Tarokan menurut data tabel di atas jumlah rumah tangga yang mempunyai akses sarana air minum memang sudah lebih dari setengah jumlah kepala keluarga (KK), tapi masih cukup banyak penduduk yang belum mempunyai akses air minum, masyarakat yang belum memiliki akses air minum merupakan masyarakat daerah lereng gunung wilis, sehingga dapat dikatakan permasalahan yang ada pada Desa Tarokan merupakan permasalahan pemenuhan kebutuhan air minum, masalah ini

disebabkan oleh banyak faktor. untuk melihat penyebab terjadinya masalah penyediaan air minum dan sanitasi yang ada pada Desa Tarokan maka identifikasi penyebab terjadinya masalah dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Identifikasi Penyebab Terjadi Masalah

No.	Masalah	Kelompok masyarakat yang menghadapi masalah	Lokasi terjadinya masalah	Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah
1.	<p>Air Minum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumur gali hanya bisa dipakai ketika musim hujan. 2. Belum pernah ada pembangunan SAM 3. Sumber air utama mata air 	Seluruh kelompok masyarakat (kaya, menengah, maupun miskin)	Dusun sagi, geneng, wates, bukaan, sukorejo	Musim hujan arinya keruh dan pada musim kemarau airnya cenderung kerin
2.	<p>Sanitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana sanitasi banyak yang belum sehat sesuai standart kesehatan 2. Lahan untuk sarana sanitasi rumah tangga di sebagian masyarakat kesulitan tempat 	<p>Kelompok masyarakat miskin (P/L)</p> <p>Kelompok masyarakat miskin (P/L)</p>		<p>Karena kebiasaan dan perilaku masyarakat tentang pengetahuan PHBS meliputi air limbah dan sampah</p> <p>Sempitnya lahan untuk sarana sanitasi di rumah tangga</p>
3.	<p>Perilaku Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku untuk PHBS terutama untuk CTPS bagi masyarakat masih sangat rendah 	Kelompok masyarakat miskin dan sebagian masyarakat kaya		Kurangnya pengetahuan dasar tentang kesehatan dan kesadaran yang rendah

No.	Masalah	Kelompok masyarakat yang menghadapi masalah	Lokasi terjadinya masalah	Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah
4.	<p>Kapasitas Masyarakat</p> <p>1. Masih rendahnya SDM dalam memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya di lembaga nasyarakat.</p>	semua kelompok masyarakat yang ada di KKM, BP-SPAMS		Usia yang sudah lanjut, kurang pengetahuan sehingga TUPOKSI tidak bisa jalan sesuai harapan.

Sumber : Data Hasil Transect Walk – IMAS 2014

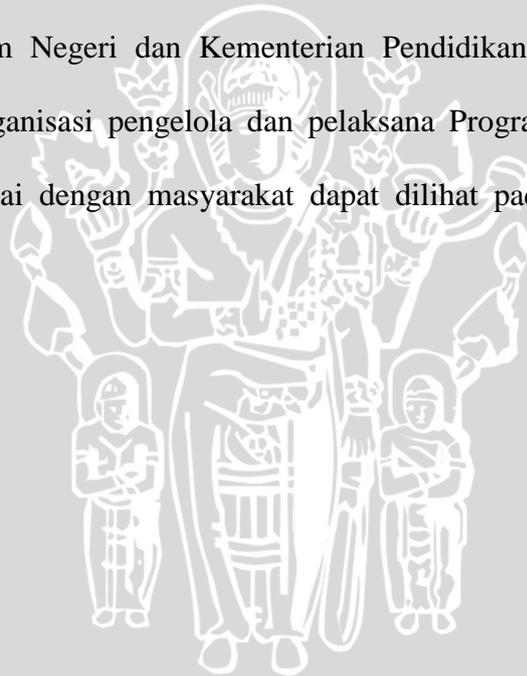
3. Mekanisme Pelaksanaan Program PAMSIMAS

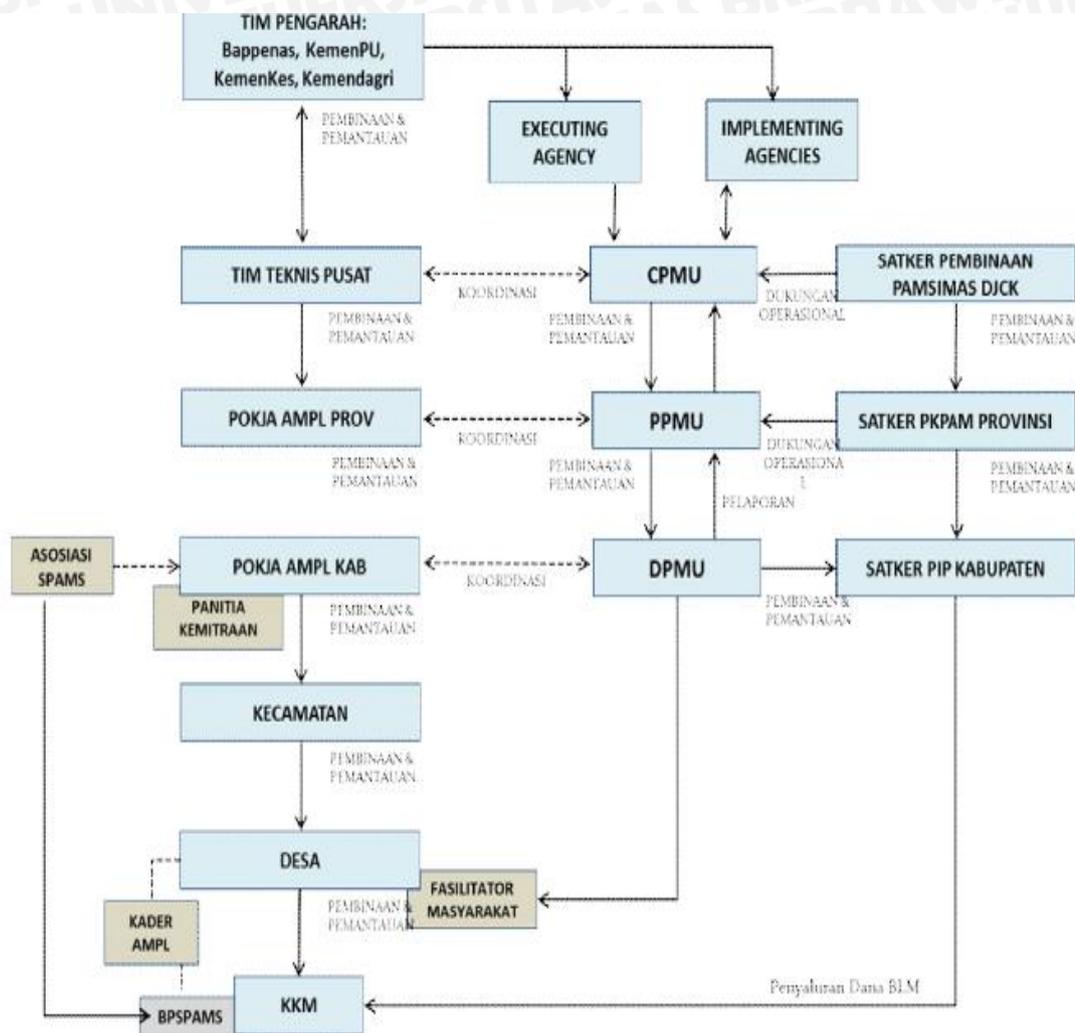
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program Pamsimas, berikut ini adalah kegiatanpokok penyelenggaraan program, yaitu:

- a) Sosialisasi program kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b) Seleksi kabupaten/kota sasaran
- c) Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
- d) Seleksi desa/kelurahan sasaran
- e) Penetapan desa/kelurahan sasaran
- f) Pelaksanaan program di tingkat masyarakat (perluasan, pengembangan, atau optimalisasi SPAM)
- g) Pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil kegiatan berbasis Sistem Informasi Manajemen
- h) Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan

- i) program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan
- j) Evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan perubahan yang dihasilkan program.

Pamsimas dilaksanakan oleh Pemerintah melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa, namun dengan mekanisme yang membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. *Executing Agency* Pamsimas adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dengan didukung Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional. Secara umum, struktur organisasi pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.3 di berikut.





Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas

C. PENYAJIAN DATA DAN FOKUS PENELITIAN

1. Evaluasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) antara rencana dengan *output* yang dihasilkan.

Dalam perbandingan antara rencana dengan output yang dihasilkan akan dilihat dari tiga indikator, antara lain: ketersediaan air, anggaran pembangunan, serta sarana dan prasarana. masing-masing indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Ketersediaan Air

Masalah ketersediaan air di Desa Tarokan masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan, masalah ketersediaan air ini terjadi terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar lereng gunung wilis. pada musim kemarau debit air menjadi berkurang, sehingga air tidak dapat sampai ke dusun yang paling bawah. Dalam program pamsimas ini, pemerintah mencoba untuk mengatasi masalah ketersediaan air yang ada di Desa Tarokan. Kebutuhan akan air bersih memang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Air bersih merupakan sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau untuk kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan kajian evaluasi yang dilakukan di lapangan, rencana untuk ketersediaan air yang akan dibangun di Desa Tarokan adalah perpipaan dengan sistem gravitasi, dengan kapasitas sumber 3 Liter/detik, dan kebutuhan air masyarakat adalah 2,68 Liter/detik. Dalam

pembangunan ketersediaan air ini pemerintah sangat memperhatikan sumber baku mutu air, kualitas air, dan penanganan pencemaran, sehingga harus dilakukan uji baku mutu dan kualitas air terhadap sumber yang akan dialirkan pada masyarakat. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Kualitas air adalah suatu kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standart terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Untuk penanganan pencemaran adalah kondisi dimana air minum yang akan di gunakan masyarakat terhindar dari pencemaran air limbah maupun pencemaran yang lain, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat pengguna air minum.

Dari pembangunan penyediaan air minum ini rencananya dengan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Jumlah pemanfaat air minum saat ini adalah 3.255 jiwa, setelah kegiatan pengembangan direncanakan dan diharapkan akan terjadi penambahan jumlah pemanfaat air minum sebanyak 950 jiwa.

Realisasi yang dihasilkan dari rencana penyediaan air minum program pamsimas di Desa Tarokan adalah debit air yang meningkat, hal ini di karenakan dilakukannya penggabungan dua sumber menjadi satu. Dengan meningkatnya debit air yang dihasilkan setelah pelaksanaan

program pamsimas, maka penerima manfaat atau pengguna airpun juga meningkat, pengguna air yang direncanakan akan bertambah 950 jiwa, setelah dilakukan program penyediaan air minum maka jumlah pengguna bertambah menjadi 390 KK atau kurang lebih 1560 jiwa.

Sebelum dilakukan penamabahan sumber air, dalam memperbaiki sistem air minum pun juga di lakukan uji laboratorium terhadap baku mutu air, yaitu dengan melihat kualitas air, apakah mengandung limbah berbahaya atau tidak, dan apakah layak untuk di konsumsi masyarakat atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dari pak wagiem (masyarakat pengguna air) menyatakan bahwa:

“ya kemarin pas ada program itu mbak, sebelum di alirkan ke rumah penduduk juga tetap dilakukan uji laboratorium tentang baku mutu air mbak, jadi kita sendiri sebagai masyarakat awam kan juga jadi ngerti kalo airnya memang layak untuk di konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan kami”.

Pernyataan diatas di perkuat dengan hasil wawancara pada ibu sulis (masyarakat pengguna air) :

“saya dulu sih percaya-percaya saja mbak sama baku mutu air dari sumber selo gentong soalnya dulu sebelum adanya program pamsimas kan sudah di lakukan uji baku mutu air juga saat ada program WESLIC-2 (*Water Supply and Sanitation for Low Income Community*) tahun 2004 lalu, tapi dengan di lakukannya kembali pengujian masalah baku mutu air membuat kami masyarakat pengguna air kan semakin aman dan percaya kalau memang air yang kita konsumsi sehari-hari ini memang tidak berbahaya dan layak untuk di konsumsi mbak”.

Dalam pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui program pamsimas, di Desa Tarokan dapat dikatakan berhasil sesuai dengan rencana. Hal ini dibuktikan dengan telah tercukupinya

kebutuhan masyarakat akan air bersih. Selain itu debit air yang meningkat juga menambah jumlah pemanfaat air bersih yang ada di Desa Tarokan.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Arie (kepala sekretariat PAMSIMAS kabupaten Kediri):

“saya menyimpulkan program pamsimas dari segi penyediaan air bersih di Desa Tarokan ini berhasil mbak, soalnya saya lihat evaluasi di lapangan bahwa memang sesuai dengan rencana, dulu direncanakan untuk menambah jumlah debit air yang akan di salurkan ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar air bisa sampai ke desa yang paling bawah, selain itu agar masyarakat tidak kekurangan air saat musim kemarau tiba. Ternyata untuk saat ini memang sudah berhasil, debit air bertambah dan belum ada tanda-tanda air tidak mengalir saat musim kemarau tiba”.

Dari hasil wawancara dengan pak sukur (Ketua SPAM) juga membenarkan keberhasilan dari program juga dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pengguna air :

“untuk keberhasilan program penyediaan air ini bisa dilihat juga dari bertambahnya jumlah pemanfaat atau pengguna air mbak, dari rencana kerja masyarakat direncanakan yang menggunakan air akan bertambah sebanyak 950 jiwa, namun dalam realisasinya pengguna air bertambah hingga 350 KK”.

b. Anggaran Pembangunan

Dalam merencanakan sebuah program tidak akan pernah terlepas dari rencana anggaran, dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan , Kabupaten Kediri ini telah tercatat dalam RKM (rencana kerja masyarakat) sejumlah Rp.245.012.804,00 dengan sumber dana dari BLM (bantuan langsung masyarakat) Rp.196.000.608,71. In Kind Rp.39.200.000,00 dan in cash

Rp.9.812.196,02. Dapat dilihat rekapitulasi kegiatan dan RKM pada tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10 .Rencana Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM

NO.	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
A	Pembangunan Sarana Air Bersih	
1	Broncapt, bak induk, dan pipanisasi	221.451.632,54
	Sub Total Kegiatan	221.451.632,54
B	Pembangunan Sarana Sanitasi	
1	Pembangunan tempat cuci tangan	2.212.000,00
	Sub Total Kegiatan Sanitasi Sekolah	2.212.000,00
C	Promosi Kesehatan	
1	PHBS Masyarakat	2.000.000,00
2	PHBS Sekolah	1.760.000,00
	Sub Total kegiatan Promkes	3.760.000,00
D	Peningkatan Kapasitas	
1	Pelatihan satlak KKM	2.522.000,00
2	Pelatihan BPSPAM	3.760.000,00
3	Pelatihan Kader AMPL	2.095.000,00
	Sub Total Kegiatan Pelatihan	8.377.000,00
E	Biaya Operasional	
1	Operasional KKM, Papan Proyek, dan Papan Pengumuman	9.200.000,00
	Sub Total Operasional KKM & satlak	9.200.000,00
	TOTAL ANGGARAN	245.000.000,00

Sumber : Rencana Kerja Masyarakat

Dari tabel rencana rekapitulasi di atas, rencana pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) terdapat lima kegiatan yaitu pembangunan sarana air bersih, pembangunan sanitasi, promosi kesehatan, peningkatan kapasitas dan biaya operasional. Dari masing-masing kegiatan telah diperkirakan anggaran yang akan dihabiskan, yaitu dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp.221.451.632,54. kegiatan pembangunan sarana sanitasi Rp.2.212.000,00. Kegiatan promosi

kesehatan Rp. 3.760.000,00. Kegiatan peningkatan kapasitas Rp.8.377.000,00. Dan biaya operasioanal sebanyak Rp. 9.200.000,00. Rencana rekapitulasi kegiatan dan biaya RKM di atas setelah dilakukan kajian dilapangan maka diperoleh realisasi anggaran sebagai berikut:

Realisasi anggaran dalam buku penerimaan dan pengeluaran Pamsimas diperoleh penerimaan masuk sejumlah Rp.251.856.500 dimana penerimaan tersebut berasal dari penerimaan In cash sebesar Rp.9.900.000 penerimaan in kind sebesar Rp.45.956.500 dan dari APBN/APBD sejumlah Rp.196.000.000. Seluruh jumlah penerimaan digunakan untuk melaksanakan kegiatan program pamsimas sebagai berikut :

Tabel 4.11 Realisasi Rekapitulasi Kegiatan dan Biaya RKM

NO.	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
A	Pembangunan Sarana Air Bersih	
1	Broncapt, bak induk, dan pipanisasi	222.097.000,00
	Sub Total Kegiatan	222.097.000,00
B	Pembangunan Sarana Sanitasi	
	Pembangunan tempat cuci tangan	10.765.000,00
	Sub Total Kegiatan Sanitasi Sekolah	10.775.000,00
C	Promosi Kesehatan	
1	PHBS Masyarakat	2.000.000,00
2	PHBS Sekolah	1.760.000,00
	Sub Total kegiatan Promkes	3.760.000,00
D	Peningkatan Kapasitas	
1	Pelatihan satlak KKM	1.139.000,00
2	Pelatihan BPSPAM	1.431.000,00
3	Pelatihan Kader AMPL	1.335.000,00
	Sub Total Kegiatan Pelatihan	3.905.000,00
E	Biaya Operasional	
1	Operasional KKM, Papan proyek, dan Papan informasi	7.565.000,00
	Sub Total Operasional KKM & satlak	7.565.000,00
	TOTAL ANGGARAN	248.102.000,00

Sumber : Buku Penerimaan dan Pengeluaran Desa Tarokan

Rencana anggaran dan realisasi dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri masih banyak anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. hal ini dapat dilihat pada tabel rencana dan realisasi di atas, untuk pembangunan sarana air bersih direncanakan akan menghabiskan dana Rp.221.451.632,54 ternyata dalam realisasi melebihi rencana yang dianggarkan yaitu Rp. 222.097.000,00. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian ini dikarenakan harga bahan bangunan yang diperkirakan dalam realisasinya lebih mahal.

Ketidaksesuaian lain juga terlihat pada kolom kegiatan pembangunan sanitasi sekolah, sanitasi sekolah berupa pembangunan wastafel direncanakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp.2.212.000,00. Namun pada realisasinya pembangunan wastafel menghabiskan dana sebesar Rp. 10.775.000,00. Ketidaksesuaian anggaran pada kegiatan pembangunan sanitasi sekolah ini dikarenakan terdapat sisa dana dari semua kegiatan pembangunannya baik dari pembangunan penyediaan air bersih, pelatihan, promosi kesehatan, maupun biaya operasional yang telah direncanakan, sehingga pembangunan wastafel yang direncanakan hanya akan di bangun 2 unit pada satu sekolah dasar, menjadi 3 sekolah dasar yang dibangun wastafel dengan masing-masing sekolah 2 unit wastafel.

Pada kolom peningkatan kapasitas terjadi ketidaksesuaian yang cukup signifikan dimana anggaran yang direncanakan untuk peningkatan

kapasitas adalah Rp. 8.377.000,00 dan pada realisasinya biaya pelatihan hanya menghabiskan dana Rp. 3.905.000,00. Dan pada kolom biaya operasional yang direncanakan Rp. 9.200.000,00 pada realisasinya adalah Rp. 7.565.000,00. Hal ini disebabkan kurang detail dalam memperkirakan biaya yang akan dihabiskan. Dari ketidaksesuaian dana rencana dan realisasi dikarenakan terjadinya penambahan pada dana In cash (berupa uang tunai) dan In kind (berupa tenaga atau material) dari masyarakat, sehingga dari keseluruhan realisasi program pamsimas di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.248.102.000 dengan total saldo akhir sebesar Rp.44.250. Namun pada keseluruhan dana yang ada, pada program pamsimas di Desa Tarokan dapat dikatakan terserap dengan baik, karena dapat memanfaatkan dana yang ada dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan ibu hartini (keuangan Desa Tarokan) mengatakan bahwa :

“Program pamsimas ini dari seluruh dana yang diberikan, tidak langsung sekaligus diberikan semua dari atas mbak, disini pencairannya melalui 3 termin. Termin satu 40%, termin dua 40%, dan termin tiga 20%. Dari masing-masing termin tersebut di buat juga RPD (Rencana Penggunaan Dana) ,setelah itu baru dana bisa cair sedikit demi sedikit. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran memang sudah wajar terjadi pada setiap rencana anggaran suatu program, hal itu dikarenakan yang namanya harga bahan bangunan kan kadang naik kadang juga turun mbak. Tapi walaupun tidak sesuai mungkin jarak antara dana yang direncanakan dengan dana yang terealisasi tidak begitu jauh”.

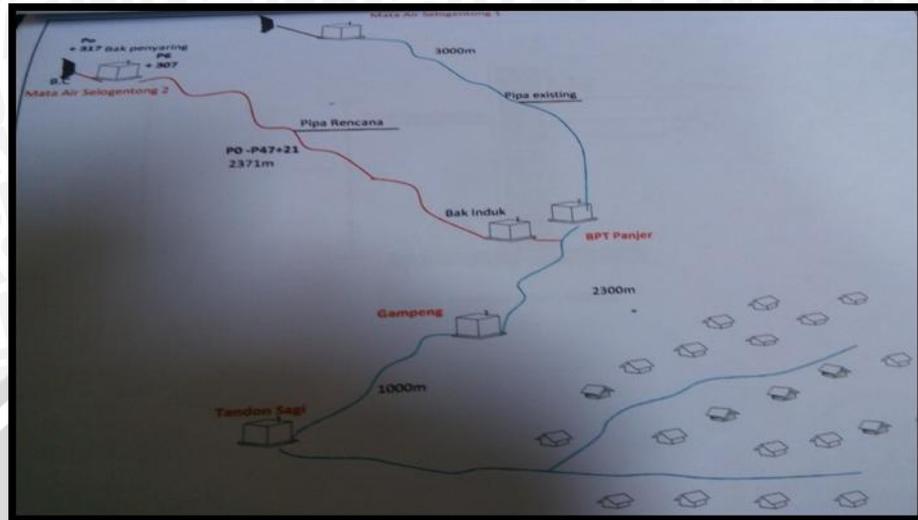
Selain hasil wawancara dari ibu hartini masalah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran di perkuat dengan hasil wawancara dari pak

gatot (satuan pelaksana program pamsimas kabupaten Kediri) yang menyatakan bahwa:

“ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi dalam suatu program tidak menjadi masalah mbak, asalkan semua kegiatan terlaksana dengan baik, dan semua target pembangunan telah tercapai. Kalaupun ada sisa anggaran yang digunakan untuk menambah jumlah pembangunan dari pembangunan yang sudah direncanakan itu diperbolehkan yang penting sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Misalnya dalam program pamsimas di Desa Tarokan ini, kalau ada rencana pembangunan sanitasi sekolah berupa wastafel 2 unit pada satu SD, dan ternyata karena anggaran yang tersisa masih ada dan dapat digunakan untuk penambahan pembangunan wastafel di 2 SD lainnya, dengan ditambahnya pembangunan wastafelkan maka bertambah juga anak-anak yang dibiasakan untuk hidup bersih dan sehat”.

c. Sarana dan Prasarana

Dari penyusunan Program Jangka Menengah Program Air Minum dan Sanitasi (PJM Proaksi) yang telah di buat oleh Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dan Satuan Pelaksana (Satlak), KKM melakukan musyawarah pleno di tingkat desa untuk di sepakati bersama dengan masyarakat tentang rencana-rencana kegiatan jangka menengah terkait dengan kebutuhan air minum dan sanitasi, selain itu juga menyepakati tentang pilihan opsi yang akan di bangun. Dengan kondisi geografis di Desa Tarokan dan sesuai dengan data-data dari survai lapang serta dari hasil penyusunan dalam PJM Proaksi dan pemilihan opsi, maka sistem air minum akan dibangun adalah “Penyediaan Air Minum dengan Sistem Perpipaan (Gravitasi)”.



Gambar 4.4 Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Sistem Gravitasi

Sumber : Rencana Kerja Masyarakat Desa Tarokan 2014

Hal ini di sepakati dengan kondisi lokasi di lapangan dan sesuai dengan peta sosial desa yang telah dibuat, kesepakatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam operasional dan pemeliharaan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dan badan pengelola. Hal ini bertujuan supaya sarana dan prasarana yang ada dapat di manfaatkan semaksimal mungkin dan dapat bertahan selamanya. Dalam membuat rencana jenis pelayanan yang akan di bangun dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Rencana Penambahan Akses dari Pamsimas

No.	Lokasi Dusun	Akses Saat ini				Rencana Penambahan Akses dari PAMSIMAS				Rencana Penyediaan SAM	
		Kaya	Menengah	Miskin	jumlah	Kaya	menengah	Miskin	Jumlah	Jeni srana air minim yang di rencanakan	Jumlah sarana yang di rencanakan
1.	Dusun Magersari	10	13	22	45	0	0	0	0	-	-
2.	Dusun Tarokan	60	89	149	298	0	0	0	0	-	-
3.	Dusun Pilangbangu	71	105	176	352	0	0	0	0	-	-
4.	Dusun Jegles	30	43	72	145	0	0	0	0	-	-
5.	Dusun Gebangkerep	92	136	228	456	0	0	0	0	-	-
6.	Dusun Wates	39	56	94	189	9	10	25	44	-	-
7.	Dusun Sukorejo	38	55	92	185	9	10	15	34	-	-
8.	Dusun Bukaana	32	46	78	156	8	8	15	31	-	-
9.	Dusun Sagi	19	27	45	91	7	7	35	49	-	-
10.	Dusun Geneng	45	67	112	224	12	15	40	67	-	-
	Jumlah	436	637	1.068	2.141	45	50	130		-	-

Sumber : Rencana Kerja Masyarakat Pamsimas 2014

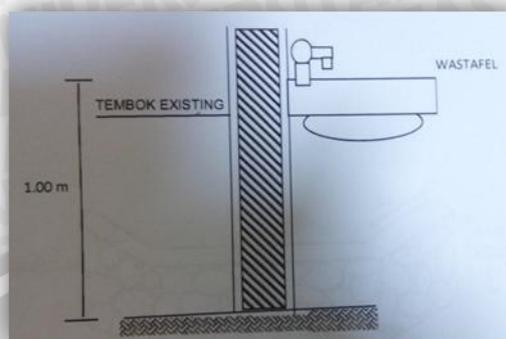
Dari data tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rencana penambahan akses air minum dalam program Pamsimas akan dilakukan pada lima dusun yang minim akan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Pembangunan akan dilakukan pada dusun sagi, wates, geneng, bukaan, dan sukorejo. Sarana prasarana air minum dan sanitasi yang akan dibangun tidak hanya pada akses air minum masyarakat, namun juga akan di bangun sanitasi sekolah, adapun sanitasi sekolah yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Jenis Kegiatan Peningkatan Perubahan Perilaku Hidup Sehat di Sekolah

Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang ada saat ini	Kualitas sarana yang ada (baik/tidak)	Jumlah sarana yang akan di bangun	Keterangan
Jamban Guru	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Numpang jamban siswa
Jamban Siswa	2 Unit	Baik		
Tempat Cuci Tangan	Tidak Ada	Tidak ada	2 Unit	

Sumber : Rencana Kerja Masyarakat Pamsimas 2014

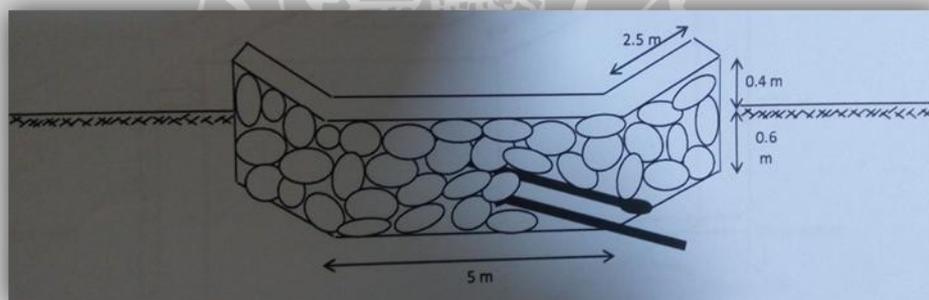
Sanitasi sekolah yang akan di bangun adalah tempat cuci tangan/wastafel sebanyak 2 unit, hal ini untuk membiasakan siswa hidup bersih dan sehat sejak dini. Selain sanitasi sekolah berdasarkan kajian evaluasi yang dilakukan di lapangan, rencana untuk sarana dan prasarana yang akan dibangun adalah sebagai berikut : *bronchapt*, bak induk, dan pipanisasi.



Gambar 4.5 Rencana Pembangunan Cuci Tangan Pakai Sabun

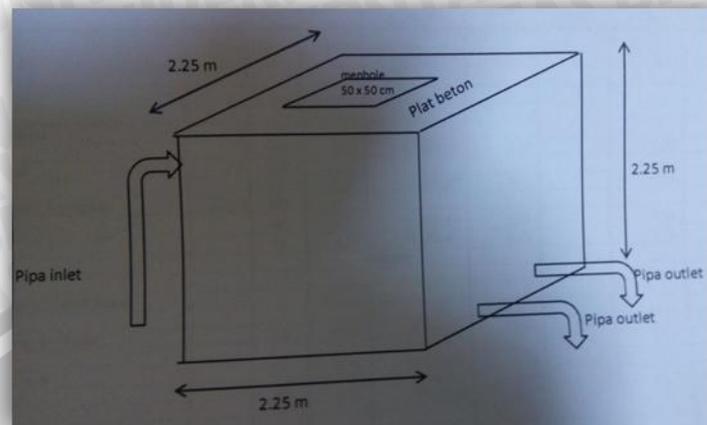
Sumber : Rencana Kerja Masyarakat Desa Tarokan, Pamsimas 2014

Pembangunan sanitasi sekolah berupa wastafel/tempat cuci tangan ini direncanakan akan dibangun di SDN Tarokan 1 saja, dengan jumlah 2 unit. Pembangunan wastafel ini diikuti dengan kegiatan promosi kesehatan di lokasi sasaran pamsimas (SDN Tarokan 1).



Gambar 4.6 Rencana Pembangunan Broncapt

Sumber : Rencana Kerja Masyarakat Desa Tarokan, Pamsimas 2014



Gambar 4.7 Rencana Bak Induk yang akan dibangun

Sumber : Rencana Kerja Masyarakat Desa Tarokan, Pamsimas 2014

Rencana pembangunan bak induk akan dilakukan bersebelahan dengan bak induk yang sudah ada yaitu bak panjer, bak induk ini masuk dalam rencana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum karena bak induk yang sudah ada tidak dapat menampung debit air yang semakin besar dari sumber air yang sudah digabungkan. Hal ini menjadikan air meluap ke luar saat musim hujan tiba.

Output atau realisasi yang dihasilkan dari rencana pembangunan sarana dan prasarana sesuai dari hasil kajian di lapangan adalah telah terbangun yaitu penyediaan air minum dengan sistem perpipaan (Gravitasi). Sistem perpipaan gravitasi merupakan sistem pengaliran air dari sumber ke tempat *reservoir* (tempat penampung sebelum di alirkan ke rumah penduduk) dengan cara memanfaatkan energi potensial gravitasi yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi *reservoir*.

Sistem gravitasi yang telah di bangun di Desa Tarokan dapat di lihat pada gambar berikut :



Gambar 4.8 Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Sistem Gravitasi pada Bak Penampung Dusun Sagi

Sumber :HasilDokumentasi Peneliti

Sistem perpipaan gravitasi memang sangat cocok dan sudah sesuai dengan lokasi geografis dari Desa Tarokan itu sendiri, lima dusun yang menggunakan dan teraliri air minum tersebut memang berada pada kemiringan yang semakin menurun, sehingga dapat menambah tekanan yang di hasikan oleh air.



Gambar 4.9 Realisasi Kegiatan Pipanisasi

Sumber : Dokumentasi Desa Tarokan

Pembangunan penyediaan air minum dengan sistem perpipaan gravitasi ini sebenarnya sudah ada dari dulu sebelum program pamsimas ini dilaksanakan, pada tahun 2007 Desa Tarokan mendapatkan program Weslic guna penyediaan air bersih. Dan sebagian besar sistem perpipaan pada

program pamsimas ini meneruskan penyediaan air bersih dari program WESLIC namun ada tambahan bak induk dan pipa guna menambah debit air yang di hasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lima dusun tersebut. Hasil dari rencana pembangunan sarana dan prasarana program pamsimas di Desa Tarokan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan dan penggantian pipa telah dilakukan baik dari sumber air menuju bak induk, selanjutnya dari bak induk menuju bak penampung, dan dari bak penampung menuju bak pembagi, sehingga masyarakat tidak perlu mengambil air jauh jauh dari bak penampung, karena dapat langsung menyalurkan pipa dari bak pembagi menuju rumah mereka masing-masing.
2. Terbangunnya *wastafel* di sekolah SDN Tarokan 1, 3, dan 4. Pembangunan wastafel dimaksudkan untuk melatih para siswa hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun. Pembangunan wastafel ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan rencana, karena pembangunan wastafel yang direncanakan hanya 2 unit pada SDN tarokan 1, namun karena dana pembangunan tersisa sehingga di manfaatkan untuk pembangunan wastafel di SDN tarokan 3 dan 4 masing-masing SD dibangun 2 unit wastafel.



Gambar 4.10 Foto Tempat Cuci Tangan pada SDN Tarokan 3 dan Tarokan 4

Sumber : Dokumentasi Peneliti

3. Terbangunnya brondchapt yang di gunakan untuk menahan longsoran tanah yang dapat menyumbat aliran air.
4. Pembangunan bak induk yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk lima dusun di Desa Tarokan, dengan di banggunya penambahan bak induk di bawah bak sumber yang telah terbangun, maka kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat tercukupi dengan baik.



Gambar 4.11 Realisasi Pembangunan Bak Induk

Sumber : Dokumentasi Desa Tarokan

Pernyataan diatas tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari bapak wito (ketua pelaksana lapangan) yang menyatakan bahwa :

“program pasmsimas di Desa Tarokan ini telah direncanakan untuk menambah jumlah debit air yang mengalir, dan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung penambahan debit air yang keluar mbak. Kemarin telah direncanakan akan di bangun penambahan bak induk, sarana sanitasi sekolah, broncapt, dan penggantian atau penambahan pipa untuk saluran baru mbak, dan pada pelaksanaannya memang sudah terbangun semua mbak, dan kini debit air juga menjadi meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi dengan baik mbak”.

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara dari pak awi (masyarakat pengguna air minum) yang menyatakan bahwa :

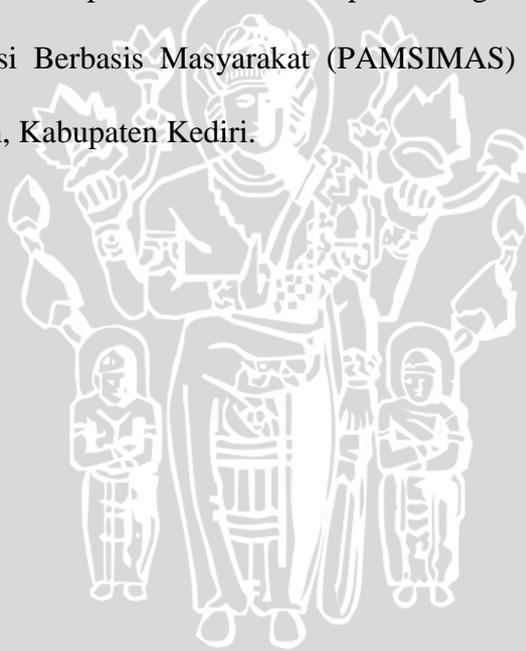
“iya mbk, program pembangunan sarana dan prasarana air minum telah dilakukan, kemarin saya dan teman-teman masyarakat lainnya telah membangun bak induk baru mbak, namanya bak panjer. Dimana bak itu di gunakan untuk menggabungkan kedua sumber yang sudah ada mbak. Kalo dulu kan Cuma satu sumber saja yang di manfaatkan dan dialirkan, nah sekarang dengan menambah bak induk sekarang dua-duanya dapat digunakan dan kebutuhan air di masyarakat semakin tercukupi, selain bak panjer, juga kita buat *brondcapt*, penambahan pipa dan penggantian pipa-pipa yang sudah bocor, dan karena dananya sisa yang rencananya di bangun 2 tempat

cuci air pakai sabun akhirnya di bangun 6 unit tempat cuci tangan pakai sabun di 3 sekolah SD Mbak”.

2. *Outcome* atau Manfaat Sarana dan Prasarana Air Bersih dari Program

PAMSIMAS

Evaluasi dari suatu program dapat dilihat dari bertambahnya penerima manfaat setelah dilaksankannya program tersebut. Dari program pamsimas yang dilakukan di Desa Tarokan ini direncanakan akan terjadi penambahan jumlah pemanfaat yaitu sebanyak 950 jiwa. Dari data yang di peroleh peneliti berikut merupakan data penerima manfaat pada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.



No	Provinsi Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa	Pemanfaat SAM				Pemanfaat SAN				Promosi Kesehatan			Realisasi Kegiatan				Pelatihan									Verifikasi					
		Pipa		Non Pipa		Dusun SBS		CTPS di Rumah Tangga		Sanitasi SD	di masyarakat		PHBS	Jml. Dusun	Dusun Intervensi yang SBS	Sanitasi SD	SD dapat PHBS	Teknik SAM dan SAN		Administrasi dan Keuangan			PromKes			BPSPAMS			Prov	Reg	
		KK	Mis	KK	Mis	100%	Verifikasi	Dusun	KK		Jiwa	(P)						Jiwa	(P)	Mis	Jiwa	(P)	Mis	Jiwa	(P)	Mis	Jiwa	(P)			Mis
7	Tarokan, Kec. Tarokan	390	121	0	0	0	10	0	187	6	50	45	3	5	5	0	3	6	1	1	6	1	1	16	15	4	3	0	0		
8	Bulusari, Kec. Tarokan	237	196	0	0	0	2	0	40	3	50	45	1	6	6	0	1	6	0	2	6	0	2	30	30	8	3	0	0		

Sumber : Website Pamsimas.org

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerima manfaat dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan sudah memenuhi diatas target atau rencana kerja masyarakat dimana dalam RKM di sebutkan rencana penambahan akses dari Pamsimas sebanyak 950 jiwa namun dalam tabel diatas dapat dilihat penerima manfaat di Desa Tarokan mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam rencana kerja masyarakat yaitu 390 KK atau kurang lebih sebanyak 1560 jiwa.

Penambahan akses dari Pamsimas ini dapat diterima manfaat-manfaat yang diharapkan oleh masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi perilaku masyarakat adalah dengan adanya program pamsimas ini masyarakat dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat yang semakin meningkat. hal ini sesuai dengan pernyataan bapak peno (masyarakat pengguna dan anggota SPAM) yang menatakan :

“Dengan adanya pamsimas ini mbak, air bersihnyakan sudah mengalir dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu mencari air minum dari sungai, atau buang air besar disungai yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit mbak, sekarang untuk buang air besar sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kloset dalam rumah karena air nya sudah dapat mengalir sampai rumah sehingga kebiasaan hidup bersih dan sehat masyarakat sedikit demi sedikit meningkat mbak”.

Selain itu pendapat ini di perkuat dengan hasil wawancara dari bapak yoga (salah satu guru di SDN tarokan IV salah satu SD yang di bangun tempat cuci tangan/wastafel) mengatakan bahwa :

“Dengan dibangunnya tempat cuci tangan pakai sabun di sekolah ini anak-anak kalau abis jajan sering cuci tangan pakai sabun mbak, sehingga kebiasaan hidup bersih dan sehat sedikit demi sedikit terbangun lah mbak pada perilaku anak-anak sehari-hari”

2. Manfaat dari segi sarana dan prasarana adalah, dengan dibangunnya sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi di Desa Tarokan maka mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, karena semakin mudah diakses, dan mudah dijangkau. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak yadi (masyarakat pengguna) yang mengatakan:

“iya mbak dengan di tambahnya bak induk, debit air semakin meningkat dan air bisa sampai rumah-rumah warga, warga tinggal membeli selang dan sudah dapat menyalurkan ke masing-masing rumah”.

Namun tidak selamanya semua warga dapat membeli selang, hasil wawancara menurut mbak sulis (warga yang saya temui saat memutuskan selang di pinggir jalan) mengatakan bahwa:

“Saya memutuskan selang dari sini soalnya saya belum bisa membeli selang dari bak pembagi ini menuju rumah saya mbak. Jadi kalau mau ambil air ya gini, saya bawa ember trus saya ambil dari sini terus saya tenteng satu persatu ke rumah saya mbak”.

3. Program pamsimas sebelum pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan serta promosi kesehatan, manfaat yang di peroleh dari hasil pelatihan-pelatihan adalah kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) dalam melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi menurut bapak aries (ketua KKM) :

“Sebelum di laksanakan pembangunan maupun sebelum pembuatan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) masyarakat maupun lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu mbak, pelatihan-pelatihan yang dilakukan antara lain

pelatihan administrasi, pelatihan teknis konstruksi, pelatihan sanitasi untuk menuju masyarakat bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, dan pelatihan-pelatihan lainnya, sehingga dengan diadakannya pelatihan itu kan akhirnya kapasitas masyarakat meningkat mbak, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan keberlanjutan dari pada program pamsimas ini mbak”.

Selain itu hasil wawancara dari pak mundopar dan pak masrudin (bendahara/unit pengelola keuangan) mengatakan bahwa:

“iya mbak, dengan adanya pelatihan administrasi, keuangan dan pelaporan kami jadi tau dan mengerti bagaimana membuat laporan dan keuangan guna melaporkan hasil program pamsimas ini, yang sebelum mendapatkan pelatihan kami merasa kesulitan dan kebingungan, namun setelah mendapatkan pelatihan kami jadi mengerti”.

4. Dengan adanya program pamsimas manfaat yang dirasakan paling besar oleh masyarakat adalah dengan semakin meningkatnya debit air, maka kebutuhan masyarakat sehari-hari terhadap air bersih dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari ibu lastri (masyarakat penerima manfaat) yang mengatakan bahwa:

“iya mbak, dengan disatukannya sumber air debit air semakin meningkat, sehingga air yang dulunya suka macet dan kadang tidak mengalir atau walaupun mengalir itu sangat sedikit menjadi semakin lancar dan debitnya semakin besar sehingga kebutuhan kami akan air bersih untuk keperluan sehari-hari dapat terpenuhi”.

Begitu juga dengan hasil wawancara dari ibu sukinem (penerima manfaat) yang mengatakan :

“dulu sebelum airnya bisa sampai rumah dan jadi lancar begini, kalau macet atau debit airnya mengecil saya mengambil air pada sumber terdekat, ada sumber mbak di sana, tidak begitu jauh sih. Tapi ya gitu harus memikul air dari sana sampei rumah. Dan airnya juga belum tau kualitas nya, kan belum pernah di uji, tapi menurut kami adanya itu ya mau gimana lagi mbak”.

5. Manfaat yang terakhir dengan adanya program pamsimas maka jumlah dusun yang mendapatkan air bersih bertambah, dengan bertambahnya jumlah dusun yang teraliri air bersih maka bertambah pula masyarakat pengguna air bersih yang layak sesuai dengan standart higienis, dan kualitasnya untuk dikonsumsi. Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan dari pak sukur (ketua SPAM) :

“ya dengan adanya program pamsimas ini kan menjadikan masyarakat pengguna air semakin banyak dan jangkauan nya pun semakin luas mbak, kalau dulu sebelum adanya program pamsimas itu air nya kalau sampai sini (dusun sukorejo, dusun paling bawah pengguna iar bersih) airnya kadang tidak mengalir mbk, soalnya kan semakin turun semakin kecil debit air yang keluar mbak, sementara kebutuhan air kita sehari-hari kan juga sama seperti dusun-dusun di atas yang lebih dahulu menerima saluran air, tapi sekarang sudah bisa lancar sampai di sini mbak. Debitnya pun semakin besar, jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk tidak kebagian air mbak”.

Selain itu pernyataan tersebut diperkuat juga oleh pendapat dari ibu jinten (masyarakat pengguna air di dusun sukorejo (dusun terbawah)) :

“yah, dengan adanya program pamsimas ini kan menjadikan kebutuhan air kita terpenuhi mbak, jadi di Desa Tarokan memang terkenal dusun kita salah satu dusun yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di dibandingkan dusun-dusun lain yang terletrak di tingkat dataran rendah, tapi sekarang dengan adanya program ini pastinya menambah jumlah dusun dan masyarakat yang teraliri air itu semakin banyak mbak, jadi berkurang masyarakat Desa Tarokan yang kesulitan air bersih mbak”.

3. Dampak dari Sarana Prasarana Air Bersih Program PAMSIMAS

Dampak merupakan perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha dari suatu masyarakat yang melakukan kegiatan. Di Desa Tarokan khususnya dusun sagi, wates, geneng, bukaan, dan sukorejo merupakan lima dusun yang memiliki masalah dengan kesulitan air bersih, air bersih yang

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya belum dapat terpenuhi dengan standart baku mutu maupun kualitas air bersih. Masyarakat penduduk lima desa tersebut hanya bergantung pada sumber air yang berasal dari sungai di atas gunung wilis yang di salurkan ke desa mereka, namun karena tempatnya yang berada di lereng gunung wilis mengakibatkan aliran yang semakin turun semakin berkurang debit air yang keluar, sehingga perlu adanya program yang dapat memperbaiki kondisi kesulitan air bersih ini. selain itu pada saat musim kemarau air pun menjadi sangat sedikit, sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2014 Kementrian Pekerjaan Umum mengadakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Desa Tarokan membuat proposal untuk diajukan agar Desa Tarokan terutama lima dusun itu mendapatkan bantuan sarana prasarana, maupun uji baku mutu air. Akhirnya Desa Tarokan mendapatkan bantuan tersebut, disini peneliti melihat dari segi dampak, dimana peneliti mencoba untuk melihat apa saja dampak yang dihasilkan dari program tersebut untuk masyarakat, apakah dampak yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti melihat dampak dari dampak lingkungan/fisik, dampak ekonomi dan dampak sosial.

Suatu kebijakan atau program yang berhasil akan menunjukkan dampak yang signifikan dan juga berdampak positif kepada masyarakat sebagai sasaran dari program tersebut, berikut ini dampak yang ada akibat adanya Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) :

a. Dampak fisik/lingkungan

Dampak suatu program pada bidang fisik/lingkungan dapat diartikan merupakan suatu program memberikan dampak kepada lingkungan/fisik setelah adanya pelaksanaan program. Dalam hal ini pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Adapun dampak program terhadap lingkungan/fisik yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan juga observasi sebagai berikut :

- 1) Bagi pengguna sarana dan prasarana air minum pada mulanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, sekarang menjadi terpenuhi kebutuhannya dan dapat dengan mudah mendapatkannya.
- 2) Masyarakat dulunya mendapatkan air dari sungai dan sumber-sumber air yang belum teruji kebersihannya dan kualitasnya, sekarang sudah dapat menggunakan air yang sudah teruji kebersihannya dan kualitasnya.
- 3) Pada saat musim kemarau panjang dulu masyarakat dusun sagi, geneng, wates, bukaan, dan sukorejo mengalami kekeringan dan air tidak dapat mengalir dengan baik, namun dengan di tambahkannya sumber air yaitu selogentong 2 di gabung dengan selogentong 1 maka tidak akan kekurangan air meskipun pada saat musim kemarau.

Namun hal itu juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dari hasil penggabungan dua sumber menjadi satu guna menambah debit air yang mengalir dari bak induk menuju bak tandon, dampak

yang tidak diinginkan dan tidak diperhitungkan adalah terbuangna air dengan sia-sia saat musim penghujan, karena penggabungan tidak dibarengi dengan penambahan besar pipa yang menuju bak tandon, sehingga pipa tidak dapat menampung aliran dengan debit yang lebih besar.

- 4) Dengan di bangunnya bak induk guna menggabungkan dua sumber menjadi satu sekarang masyarakat menjadi tidak kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air bisa langsung sampai di rumah warga, dan tidak perlu susah payah memikul air dari bak induk, namun cukup dengan membeli selang guna menghubungkan air dari bak pembagi menuju rumah masyarakat masing-masing.

Namun sebagian masyarakat masih ada yang memutuskan sambungan selang saluran di pinggir jalan yang menuju ke rumah warga lain guna mengambil air, hal itu dikarenakan tidak sanggupnya mereka untuk membeli selang untuk sampai ke rumah mereka. Dan hal tersebut dapat menghambat aliran air yang menuju rumah warga lainnya.

- 5) Dengan adanya sarana dan prasarana air minum tentu banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Tarokan khususnya pada masarakat pengguna air bersih di dusun sagi, geneng, wates, mbukaan, dan sukorejo. Karena dulunya tidak dapat memnuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

- 6) Dan tentunya lingkungan menjadi lebih terjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan karena masyarakat yang mulai hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas.
- 7) Dengan di bangunnya sarana dan prasarana cuci tangan pakai sabun menjadikan anak-anak yang dulunya sebelum makan tidak cuci tangan pakai sabun sekarang telah membiasakan cuci tangan pakai sabun dan resiko penyakit yang di akibatkan kuman dan bakteri dari tangan yang kotor seperti diare dapat berkurang.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sawal (masyarakat pengguna sekaligus anggota SPAM) yang mengatakan :

“Sekarang dengan adanya program pamsimas berdampak pada kebutuhan air semakin baik mbak, sudah dapat terpenuhi. Dari pada yang dulu sebelum ada pamsimas kalau musim kemarau pasti kekeringan dan kekurangan air wong musim penghujan aja kekurangan dulu itu, apa lagi musim kemarau. sehingga kalau kekurangan air masyarakat mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dari sungai dan sumber-sumber terdekat yang belum teruji kualitasnya, pokoknya ada air mbak. Ya, meskipun sungai maupun sumber yang masih mengeluarkan air lumayan jauh juga mbak dan biasanya ambilnya harus di pikul menggunakan ember secukupnya”.

Sedangkan hasil wawancara dari Bapak wahyu selaku guru mengajar di SDN tarokan III mangatakan :

“Ya dampaknya, sekarang anak-anak menjadi sedikit demi sedikit terbiasa untuk mencuci tangan pakai sabun mbak, meskipun ya susah untuk membiasakan hidup bersih seperti itu, apalagi anak-anak, kan masih semauanya sendiri mbak”.

Selain itu di tambahkan oleh ibu tukijem (warga pengguna air minum) yang mengatakan bahwa:

“kalo dulu saya harus memikul air dari sumber jauh sana mbak, sekarang saya tinggal muter kran udah keluar airnya. Jadi gak perlu repot-repot lagi buat mikulin air untuk kebutuhan sehari-hari. Intinya ya kebutuhan air nya semakin terpenuhi dengan dibangunnya sarana dan prasarana air minum di desa kita ini mbak, ya meskipun sekarang masih digilir dan belum bisa 24 jam nyala krannya, paling tidak bisa tandon dirumah untuk kebutuhan 24 jam mbak”.

b. Dampak ekonomi

Dampak suatu program pada aspek perekonomian masyarakat dapat diartikan mampukah suatu program memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat setelah adanya pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat dampak ekonomi dari pelaksanaan program Pamsimas pada Desa Tarokan Kabupaten Kediri.

Dari hasil wawancara dan juga observasi di lapangan memang dampak dari segi perekonomian masyarakat tidak secara signifikan dan tidak begitu nampak. Karena ada atau tidak adanya air bersih masyarakat dalam segi pendapatan tidak berpengaruh, hal ini dikarenakan air yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci piring, pakaian, minum, dan masak. Tidak untuk keperluan seperti sawah ladang yang dengan adanya air bersih ini digunakan untuk irigasi tanaman mereka, atau usaha lainnya, sehingga memang apabila dari segi ekonomi tidak berpengaruh, mungkin kalau air bersih pengaruhnya lebih signifikan pada kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat lebih meningkat, sehingga penyakit yang disebabkan oleh pengaruh air yang kotor dan keruh menjadi berkurang dan masyarakat dapat berhemat uang untuk berobat.

Selain itu dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air dapat meningkatkan produktifitas masyarakat untuk menjalankan aktifitas sehari-hari mereka, karena air merupakan kebutuhan paling utama bagi semua makhluk hidup.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dari pak paijo (Anggota SPAM) dan pak senin (masyarakat pengguna air bersih), menurut pak paijo mengatakan bahwa:

“Keberadaan air bersih tidak berpengaruh mbak untuk peningkatan perekonomian kita. ya karena ada atau tidak adanya air, perekonomian kita tetap begini-begini saja. Ya mungkin kita menjadi lebih sering mandi dan lebih mudah kalau mencari air untuk masak dan minum mbak, terus sekarang ini dengan air minum yang bersih dan sudah teruji kualitasnya perut saya jarang sakit biasanya sering diare, tapi itu penyakit yang sudah biasa kami alami”.

Sedangkan menurut hasil wawancara dari pak senin (masyarakat pengguna air minum) juga sama beliau menyatakan bahwa :

“Dengan terpenuhinya kebutuhan kita akan air minum untuk saat ini memang tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan kami mbak. Pasalnya memang airnya hanya cukup untuk di gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari saja, belum dapat di gunakan untuk keperluan sawah”.

c. Dampak sosial

Setelah kedua dampak yang telah disajikan oleh peneliti diatas, dampak yang terakhir dalam penelitian ini adalah dampak pada aspek sosial yang dapat diartikan sejauh mana program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ini dapat menjangkau dampak pada aspek-aspek sosial masyarakat.

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang memebentuk organisasi sosial yang bersifat kompleks sehingga masyarakat sering disebut dengan sekumpulan manusia yang pada hakikatnya merupakan kumpulan dari makhluk sosial. Dalam organisasi sosial tersebut terdapat nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dan berfungsi sebagai aturan-aturan atau batasan-batasan untuk bertingklaku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Adanya suatu perubahan dalam masyarakat akibat perubahan sosial bergantung pada keadaan masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan (*progress*). Bahkan, dapat pula merupakan suatu kemunduran masyarakat. Apabila peneliti melihat dari hasil observasi dan wawancara di lapangan banyak dampak sosial yang terjadi, antara lain:

- 1) Adanya kemandirian, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memeperbaiki lingkungannya khususnya dalam pembangunan air bersih, hal ini dibuktikan dengan turut berpartisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pembangunan, konstruksi, dan operasiaonal.
- 2) Adanya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan air bersih.
- 3) Meningkatnya kebiasaan hidup bersih dan sehat masyarakat dengan mengkonsumsi air yang sehat serta kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, sehingga dapat mengurangi timbulnya penyakit yang di sebabkan oleh air.

- 4) Timbulnya rasa saling memiliki akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, pada khususnya dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana air bersih yang telah difasilitasi oleh pemerintah.
- 5) Akses untuk mendapatkan air bersih semakin mudah dan kebutuhan akan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh ketua pelaksana KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tirto Mulyo, Bapak Aries, yang mengatakan :

“Pada saat sebelum pembangunan perwakilan masyarakat kan di berikan pelatihan mbak, jadi kapasitas masyarakat meningkat dalam pengelolaan air minum. Selain itu pada tahap pembangunan dan konstruksi masyarakat kompak ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana air minum semakin meningkat pula kebiasaan hidup bersih dan sehat masyarakat mbak, soalnya air yang dikonsumsi masyarakatkan airnya bersih gak kayak dulu airnya seadanya”.

Selain itu menurut bapak kasim (masyarakat pengguna air bersih) menyatakan bahwa :

“Dulu saya sering mencari air di sungai mbak untuk kebutuhan sehari-hari, tapi sekarang saya sudah dapat minum air bersih yang sudah teruji kualitas nya mbak, sekarang kita sadar bahwa hidup bersih dan sehat itu memang perlu mbak, apalagi dengan semakin banyaknya macam-macam penyakit yang ditimbulkan dari air, kuman dan lain-lain. Buat, makan aja susah mbak apalagi buat berobat, jadi lebih baik mencegah mbak dari pada mengobati”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat telah berhasil memberikan dampak sosial bagi masyarakat pengguna, yang dulunya masyarakat tidak peduli dengan kondisi lingkungan, sekarang rasa peduli dan rasa saling memiliki telah tumbuh.

G. Pembahasan Dan Analisis

1. Analisis Terhadap Perbandingan Antara Rencana dengan *Output* yang Dihilangkan

Pengertian administrasi menurut Sugandha (1991 : 14) berarti seluruh proses kegiatan penetapan dan pencapaian tujuan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien bersama-sama melalui orang-orang yang terkoordinir dengan *PEOPLE* yang terkoordinir juga. *PEOPLE* adalah akronim dari *Planning, Executing, Organizing, Persuading, Leading, dan Evaluating*. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi karena evaluasi sangat penting untuk dilakukan dalam melihat keberhasilan suatu program. Evaluasi menurut Crawford dalam Dimayati dan Mudjiono (2006:191) dapat diartikan sebagai berikut bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *ex-post evaluation* menurut Pariata Westra (1983:46-47) *ex-post evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu. *Ex-post evaluation* dilakukan pada program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Menurut Keban (2004), Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih *responsive* terhadap kebutuhan sosial. Adminiatrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efesiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Dalam konteks permasalahan penyediaan air minum di Indonesia pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum membuat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Malayu Hasibuan (2006:72) mendefisikan sebuah program sebagai berikut : “ Program adalah suatu jenis rencana yang konkrit karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan”. Adapun definisi program menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah: “Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tentunya memiliki tujuan dan berorientasi melakukan perubahan kearah yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungannya. Agar program dapat dinilai memberikan perubahan maka perlu adanya indikator-indikator yang di gunakan untuk mengukur

keberhasilan suatu program itu sendiri. Dalam evaluasi ini mencoba melihat kondisi air minum dan sanitasi dari program pamsimas di Desa Tarokan, dengan membandingkan antara rencana dan *output* yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi Program Menurut Sutisna (2000:250) bahwa :

“Evaluasi program adalah unsur lain yang penting dari keseluruhan proses pengelolaan kegiatan. Evaluasi program, pada umumnya berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Evaluasi program adalah proses yang menentukan betapa baiknya organisasi, program-program atau kegiatan-kegiatan sedang atau telah mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Dengan kata lain evaluasi program adalah membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dengan yang dikehendaki dan merumuskan pendapat tentang perbuatan organisasi dan anggotanya didasarkan pada perbandingan itu”.

Untuk memudahkan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, peneliti akan membagi kedalam tiga indikator dalam melihat keberhasilan program pamsimas dalam menyediakan air minum, dan sanitasi. Tiga indikator diatas antara lain melihat rencana dan *output* dari ketersediaan air, anggaran pembangunan, serta sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi. Hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut:

a) Ketersediaan air

Hasil analisis dan observasi di lapangan, rencana dengan *output* yang dihasilkan terhadap ketersediaan air melalui program pamsimas di Desa Tarokan, maka dapat dikatakan berhasil. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan di lapangan, antara rencana dan output yang dihasilkan sudah sesuai. Analisis yang

dilakukan dengan melihat pelaksanaan penyediaan air. penyediaan air ini telah dilakukan pengujian baku mutu air, peningkatan jumlah pemanfaat, dan penambahan jumlah debit air yang dialirkan pada masyarakat telah sesuai dengan yang direncanakan.

Pembangunan sistem air minum juga dapat dikatakan sesuai antara rencana dengan output yang dihasilkan, direncanakan akan dibangun sistem perpipaan gravitasi, dalam realisasinya telah dibangun sistem penyediaan air minum dengan sistem perpipaan gravitasi. Penyediaan air merupakan salah satu tujuan dari program pamsimas, menambah jumlah masyarakat pengguna air yang layak di setiap daerah di Indonesia. Dengan dilaksanakannya program pamsimas di Desa Tarokan maka, telah tercapai tujuan dari program pamsimas karena telah menambah jumlah pemanfaat air bersih.

b) Anggaran pembangunan

Hasil analisis dan observasi yang dilakukan di lapangan, anggaran pembangunan dalam program pamsimas di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut : anggaran pembangunan yang direncanakan pada program pamsimas di Desa Tarokan sebesar Rp.245.000.000,00 namun dalam realisasinya pembangunan pamsimas menghabiskan anggaran sebesar Rp.245.777.000,00. Sehingga, anggaran pembangunan dalam program pamsimas dapat dikatakan tidak sesuai. namun dalam menyerap dana yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan telah terserap dengan

baik.hal ini dibuktikan melalui beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, kegiatan pembangunan yang dimaksud dalam program pamsimas antara lain adalah kegiatan pembangunan sarana air bersih, pembangunan sanitasi, promosi kesehatan, peningkatan kapasitas dan biaya operasional.

c) Sarana dan prasarana

Hasil analisis dan observasi yang dilakukan di lapangan dengan melihat pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan, dengan pembangunan sarana dan prasarana yang terbangun, maka dapat dikatakan tidak sesuai. hal ini dibuktikan dengan melihat rencana pembangunan yang akan dibangun adalah pembangunan sistem air minum dengan menambah/mengganti pipa yang mengalami kerusakan, membangun 1 unit bak induk, pembangunan 1 unit *brondcapt*, dan pembangunan sanitasi sekolah berupa wastafel sebanyak 2 unit. Namun, dalam realisasi di lapangan telah dilakukan penggantian dan penambahan pipa pada saluran air baru dari sumber menuju bak induk baru, telah terbangun 1 unit bak induk baru, telah terbangun 1 unit *brondcapt*, ketidaksesuaian terjadi pada pembangunan sanitasi sekolah, dalam rencana kerja masyarakat direncanakan akan dibangun 2 unit wastafel pada 1 sekolah dasar, dalam realisasinya telah terbangun 6 unit wastafel pada 3 sekolah dasar.

Ketidaksesuaian ini terjadi karena terjadi sisa anggaran, sehingga dilakukan penambahan pembangunan wastafel untuk menyerap sisa

anggaran yang ada, selain itu karena dirasa memang perlu adanya sanitasi sekolah di masing-masing sekolah dasar di Desa Tarokan. Pembangunan sanitasi sekolah dilakukan untuk mendukung kebiasaan para siswa hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun.

2. Outcome atau Manfaat Sarana dan Prasarana Air Bersih dari Program

PAMSIMAS

Menurut buku pedoman Pamsimas Tahun 2013, Tujuan dari program pamsimas adalah bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, dengan tujuan menambah jumlah masyarakat yang terlayani akan kebutuhan air minum, artinya menambah pula penerima manfaat dari pengguna layanan air minum, sehingga evaluasi program juga dapat dilakukan dengan melihat seberapa besar suatu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran, dengan demikian peneliti mencoba melihat keberhasilan program pamsimas dengan menganalisis dan mengidentifikasi manfaat yang ada di Desa Tarokan setelah adanya program pamsimas pada tahun 2014.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara pada masyarakat pengguna di Desa Tarokan, dan stakeholder lain yang terlibat peneliti menemukan sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Program pamsimas dapat meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk dapat membiasakan praktek hidup bersih dan sehat serta dengan dibangunnya sanitasi sekolah juga dapat meningkatkan kebiasaan cucitangan pakai sabun para siswa meningkat, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya ancaman akan penyakit yang disebabkan dari bakteri yang timbul dari tangan-tangan yang kotor.
2. Program pamsimas merupakan program yang memberikan bantuan berupa pembangunan sarana dan prasarana, dan pada tahun 2014 Desa Tarokan mendapatkan bantuan dengan kategori perluasan, dimana pembangunan dilakukan dengan meningkatkan keberfungsian kembali dan menambah akses sarana prasarana air minum yang sudah ada, dengan dibangunnya sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi di Desa Tarokan menjadikan akses semakin mudah dan masyarakat yang mempunyai akses air minum pun bertambah.
3. Program pamsimas sebelum melaksanakan pembangunan terlebih dahulu dilakukan pelatihan-pelatihan, sehingga manfaat yang di peroleh dari hasil pelatihan-pelatihan adalah kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) dalam melaksanakan layanan air minum berbasis masyarakat semakin meningkat.

4. Adanya program pamsimas manfaat yang dirasakan paling besar oleh masyarakat adalah dengan semakin meningkatnya debit air sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari.
5. Program pamsimas menambah jumlah dusun yang mendapatkan air bersih bertambah, dengan bertambahnya jumlah dusun yang teraliri air bersih maka bertambah pula masyarakat pengguna air bersih yang layak sesuai dengan standart higienis, dan kualitasnya untuk dikonsumsi.

3. Dampak Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Program yang dibuat oleh pemerintah tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta memberikan dampak-dampak positif bagi masyarakat yang telah mendapatkan program tersebut. Dalam program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sesuai dengan definisi evaluasi program menurut *Word bank* (2004) dalam Iskandar (2012) adalah suatu kegiatan penilaian yang sistematis dan seobyektif mungkin terhadap suatu obyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau telah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya, tujuan dari evaluasi program adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efesiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutannya, dimana suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak yang menerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan. Evaluasi merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk menilai atau mengukur secara sistematis

kelebihan maupun kelemahan suatu program dan memutuskan apakah program layak dilanjutkan atau diperbaiki.

Menurut *Departement For International Development (DFID)* (2005) dalam Iskandar (2012) konteks umum evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada saat imlementasi program berjalan dan bertujuan pada peningkatan kinerja program yang dievaluasi, melalui pembelajaran (*learning*) dari pengalaman yang telah diperoleh. Pada kebanyakan program, evaluasi ini lebih substansial diarahkan pada terjadinya perubahan antara desain program dan imlementasi, validasi atau penilaian awal terhadap relevansi, efektifitas dan efesiensi. Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi program selesai. Tujuan utamanya adalah untuk menilai keberhasilan suatu program dari sisi desain, manajemen, efektifitas, output, dan dampak. Pada saat ini evaluasi sumatif lebih diutamakan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga dalam penelitian ini dapat dikatakan termasuk dalam jenis evaluasi sumatif, dimana evaluasi ini dilakukan setelah program diimplementasikan, dan bertujuan untuk melihat otput, manfaat dan dampak yang dihasilkan.

Selain itu dalam evaluasi menurut pamsimas dapat dilakukan dengan sering disebut studi dampak, dimana study dampak merupakan Program Pamsimas melalui kerja sama dengan konsultan atau pihak lain melakukan survei/studi dampak/manfaat ekonomi, sosial, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setelah adanya program tersebut.

Pada dasarnya program dibuat untuk mendapatkan dampak yang diinginkan guna mengatasi permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat selain itu dengan melihat dampak dari suatu program maka dapat dinilai keberhasilan suatu program, sehingga peneliti berusaha melihat secara spesifik mengenai dampak yang terjadi dalam masyarakat setelah dilaksanakannya program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ini. Berikut dampak yang terjadi dengan pelaksanaan program, antara lain sebagai berikut :

a) Dampak pada bidang fisik/lingkungan

1. Bagi para pengguna sarana dan prasarana yang pada mulanya kekurangan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, minum, mencuci, mandi, tentu berbeda sekarang sudah dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih guna kebutuhan sehari-hari mereka.
2. Masyarakat yang dulunya memikul air dari sungai menggunakan ember sekarang sudah dapat membeli selang dan mengalirkan air dari bak pembagi menuju rumah mereka masing-masing.
3. Dengan penambahan pembangunan bak induk serta penggantian dan penambahan pipa guna penggabungan dua sumber air menjadi satu dengan sistem gravitasi sehingga debit air meningkat dan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba.
4. Dengan adanya pembangunan *brondcapt* masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan macetnya air akibat air yang tidak dapat mengalir

ke pipa, karena *brondcapt* berfungsi untuk menangkap air sungai menuju pipa.

5. Dengan dibangunnya tempat cuci tangan pakai sabun pada tiga SD di Desa Tarokan akan meningkatkan kebiasaan dan kesehatan bagi anak-anak SD.

b) Dampak pada aspek ekonomi

1. Dengan semakin meningkatnya kualitas air yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya maka semakin meningkat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang dulunya sering terkena penyakit akibat kualitas air yang belum teruji sekarang menjadi berkurang, sehingga secara finansial dapat menghemat pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk berobat.
2. Dengan berkurangnya penyakit akibat kualitas air yang buruk, masyarakat pastinya akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan begitu bisa bekerja secara optimal, hal ini tentunya akan menyebabkan semakin meningkat pula kesejahteraan mereka.

Dampak pada aspek ekonomi dari segi finansial memang air belum dapat digunakan untuk kebutuhan sawah atau ladang masyarakat guna meningkatkan hasil pertanian mereka, namun setidaknya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka akan air.

Setelah dilaksanakannya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri maka tercapailah tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kualitas air bersih dan menambah jumlah penduduk pengguna air untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Dampak pada aspek sosial

1. Adanya kemandirian, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memperbaiki lingkungannya khususnya dalam pembangunan air bersih, hal ini dibuktikan dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pembangunan, konstruksi, dan operasiaonal.
2. Adanya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan air bersih.
3. Meningkatnya kebiasaan hidup bersih dan sehat masyarakat dengan mengkonsumsi air yang sehat serta kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, sehingga dapat mengurangi timbulnya penyakit yang di sebabkan oleh air.
4. Timbulnya rasa saling memiliki akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, pada khususnya dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana iar bersih yang telah difasilitasi oleh pemerintah.
5. Akses untuk mendapatkan air bersih semakin mudah dan kebutuhan akan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik
6. Dengan adanya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, hasil pembangunan dapat berjalan dengan baik dan

transparan, karena pengelolaannya dikelola oleh masyarakat dengan begitu pembangunan yang ada dapat berlangsung lama dan lestari karena adanya rasa memiliki dan menjaga dari masyarakat.

Dampak sosial dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, banyak membawa perubahan kepada pola sikap masyarakat yang memandang bahwa pengelolaan air bersih adalah hal yang sangat penting dan itu juga menjadi tanggung jawab mereka bukan hanya tanggung jawab pemerintah, esensinya adalah tujuan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan di desentralisasikan ke daerah-daerah melalui dinas cipta karya dan pekerjaan Umum kabupaten Kediri telah sepenuhnya berdampak baik dan positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta sesuai dengan tujuan dan latar belakang yang telah ditentukan dalam program ini yaitu Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh beberapa kesimpulan dan saran dari peneliti, antara lain sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri membawa perubahan yang baik dengan semakin bertambahnya penyediaan sarana dan prasarana air minum maka semakin terpenuhinya kebutuhan air masyarakat. Perbandingan antara rencana dengan output yang dihasilkan juga sudah sesuai, baik dilihat dari penyediaan air minum, sarana dan prasarana, serta anggaran program pamsimas, sehingga dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara rencana dan *output* yang ada dilapangan telah sesuai, meskipun anggaran dan sarana prasarana terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan *output* namun ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya tambahan anggaran dari masyarakat dan sarana prasarana tidak sesuai dengan rencana dikarenakan terjadi penambahan jumlah wastafel pada sanitasi sekolah.
2. Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri memberikan manfaat sesuai dengan harapan dan tujuan dari program tersebut yaitu dapat menambah jumlah pengguna air, meningkatkan kebiasaan hidup bersih dan sehat, dan semakin mempermudah akses masyarakat dalam

menjangkau air bersih, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terhadap air bersih dengan tanpa kekurangan lagi.

3. Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri telah membawa dampak yang cukup baik khususnya bagi pengguna sarana dan prasarana penyediaan air minum di dusun dusun sagi, geneng, wates, mbukaan, dan sukorejo. Adapun dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dampak pada bidang fisik/lingkungan yaitu Bagi para pengguna sarana dan prasarana yang pada mulanya kekurangan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti masak, minum, mencuci, mandi, tentu berbeda sekarang sudah dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih guna kebutuhan sehari-hari mereka dengan akses yang mudah.
- b. Dampak pada aspek ekonomi yaitu dengan adanya Program Penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat adalah dampak pada aspek ekonomi dari segi finansial memang air belum dapat digunakan untuk kebutuhan sawah atau ladang masyarakat guna meningkatkan hasil pertanian mereka, namun setidaknya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka akan air.
- c. Dampak pada aspek sosial cukup banyak karena pengaruh dari program ini yang bersifat bottom up, yakni masyarakat dilibatkan

langsung pada keseluruhan program ini sangat baik diterima oleh masyarakat dari pada program yang bersifat top down, beberapa dampaknya adalah adanya kemandirian, kesadaran, kepedulian kapasitas, masyarakat dalam memperbaiki lingkungannya khususnya dalam pembangunan air bersih.

Dilihat dari segi dampak, baik dampak fisik, dampak ekonomi, maupun dampak sosial peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Pamsimas dapat memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa program pamsimas telah berhasil dalam menyediakan air minum dan sanitasi pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

Dilihat dari segi paradigma administrasi publik, program Pamsimas ini termasuk dalam paradigma “*New Public Service*” (NPS). Dimana pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional. Dengan demikian, peran pemerintah adalah melayani (*servicing*), tidak lagi steering atau bahkan *rowing* dan posisi publik bukan lagi sekedar *klien*, *konstituen* ataupun pelanggan, tapi lebih sebagai warga negara (*citizen*). Praktek dalam program pamsimas yang mengutamakan partisipasi masyarakat dapat dikatakan berhasil dan efektif untuk dilakukan pada program-program selanjutnya.

2. Saran

Untuk memperbaiki Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai bahan masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta serta masyarakat, saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. BPSPAM sebagai pengelola sarana dimasyarakat sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun hal ini berdampak masyarakat seolah menyerahkan tanggungjawab pemeliharaan sarana kepada BPSPAM dan masyarakat hanyasebagai pengguna air saja selain itu banyak masyarakat yang sulit untuk membayar iuran. Agar masyarakat memiliki rasa saling memiliki mungkin dengan cara adanya penggiliran BPSPAM disetiap dusun dan adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak membayar iuran, sehingga kepedulian untuk menjaga, bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pengguna.
2. Penggabungan dua sumber mata air yaitu sumber air selo gentong 1 dan selogentong 2 memang merupakan solusi yang baik untuk menambah jumlah debit air, tapi alangkah baiknya sebelum menggabungkan dua sumber tersebut juga memperhitungkan debit air yang akan dihasilkan, sehingga mengetahui apakah pipa dapat memuat debit yang sekian. Penggabungan 2 sumber tanpa mengganti pipa sesuai dengan debit air yang keluar menjadikan air yang sampai di bak induk menjadi terbuang dengan sia-sia karena pipa terlalu kecil.

3. Pendekatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan organisasi pelaksana pada program Pamsimas sudah baik dan melibatkan masyarakat, dan akan lebih baik bila pada saat sosialisasi pemerintah menggerakkan seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam setiap pertemuan sosialisasi, sehingga rasa memiliki sarana akan semakin bertambah.
4. Program pamsimas merupakan program yang cukup baik dan tepat sasaran, bantuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana air minum sudah sesuai, namun alangkah baiknya apabila pemberian bantuan pipa juga di berikan pada warga yang kurang mampu bisa sampai rumah mereka, sehingga kejadian memutuskan saluran air di pinggir jalan oleh masyarakat untuk mengambil air karena tidak sanggup membeli selang sampai rumah tidak terjadi, karena hal itu dapat menyebabkan terhambatnya air yang di di salurkan di rumah warga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rieke Cipta
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cipi Safrudin, 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi aksara
- Crist, dkk. tt. *Evaluasi Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Tembalang*. Artikel Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Dimiyanti dan Mudjiono. 2006. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P.2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Samsul dan Mutrofin. (2006). *Pengantar Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Pressindo
- Hesti, Khalikussabir, dan Kurniawan. 2012. *Filosofis Pelayanan Publik*. Malang:Setara Press.
- Iskandar, Fuat. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus Universitas Sebelas Maret)*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI
- Jones, C.O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta:CV Rajawali.
- Keban, Yeremias T., Ph.D., 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maraya, Satriana. 2011. *Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Regular Di Uptp Balai Latihan Kerja Industri Makssar*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin.
- Miles, Hubberman & Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United States Of America: Sage Publications.

- Moeloeng. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh.2002. *Metode Penelitian*. Ciawi: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant D.2009. *Analisa Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT.ELLEX Media Komputindo
- Pamsimas. 2013. *Pedoman Umum Pengelolaan Pamsimas*. Jakarta Pusat: Sekretariat CPMU
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Ruslan, Rosadiye. 2003. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung
- Syafiie, Inu Kencana, Djameluddin Tandjung, Supardan Mudeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soenarko, H.2005. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Sugandha, Dann. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Cetakan kedua, Jakarta: Intermedia
- Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta,cv
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Professional*. Bandung : Angkasa
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya. 1984. *Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasioanal*. Jakarta: Gunung Agung
- Wirawan. 2011. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zaidan. 2010. *Pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia*. Universitas Sjakhyakirti.
- Pamsimas.2012. *Latar Belakang Program Pamsimas*. Diakses melalui http://new.pamsimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15:latar-belakang&catid=2:uncategorised&Itemid=101. Pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Depkes. tt. *Promosi Kesehatan Masyarakat Dalam Program Pamsimas*. Diakses melalui <http://new.pamsimas.org>. Pada tanggal 31 Oktober 2014.
- UNDP. tt. *Millennium Development Goals UNDP in Indonesia*. Diakses melalui <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/mdgoverview/>. Pada tanggal 31 Oktober 2014.
- UNDP. 2008. *Millennium Development Goals*. Diakses melalui <http://www.undp.or.id/pubs/docs/let%20speak%20out%20for%20mdgs%20-%20id.pdf>. Pada tanggal 31 Oktober 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran V Tentang Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Mentri Nomor 27 Tahun 2014 Bab III tentang Evaluasi
- Rencana Kerja Masyarakat Pada Program Pamsimas Desa Tarokan Tahun 2014
- RPJM Des Desa Tarokan Tarun 2014-2018

Lampiran**PEDOMAN WAWANCARA****A. PAKEM (Panitia Kemitraan/ Bappeda) dan Dinas PU**

- 1) Apakah peran pakem dalam program pamsimas ini?
- 2) Bagaimana pakem bertanggung jawab atas dana yang diberikan oleh daerah/nasional untuk berlangsungnya program pamsimas ini?
- 3) Sampai mana pertanggung jawaban pakem sendiri terhadap pelaksanaan program pamsimas ini?
- 4) Berapa jumlah desa yang menerima program pamsimas di kabupaten Kediri ini?
- 5) Bagaimana pelaksanaan program? Apakah sudah sesuai dengan rencana awal yang diharapkan di desa tarokan?
- 6) Bagaimana dinas PU bertanggung jawab dalam program pamsimas di desa tarokan?
- 7) Bagaimana evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program oleh dinas PU?

B. Anggota KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) Desa Tarokan

- 1) Bagaimana cara desa tarokan mendapatkan program pamsimas ini?
- 2) Apa sebenarnya masalah yang terjadi di desa tarokan ini mengenai kebutuhan air dan sanitasi masyarakat?
- 3) Berapa lama program pamsimas ini dimulai dari proses perencanaan hingga selesai pembangunan dan dapat digunakan oleh masyarakat pengguna?

- 4) Berapa dana yang dihabiskan untuk program ini?
- 5) Bagaimana cara pencairan dana dari kabupaten menuju desa? Apakah sekaligus atau bertahap?
- 6) bagaimana dampak yang dihasilkan dari terlaksananya program pasmimas di desa tarokan?
- 7) Bagaimana sistem perpipaan yang dibangun? Apakah sudah sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat?

C. SATLAK (Satuan Pelaksana)

- 1) Bagaimana program ini dilakukan?
- 2) Apakah ada hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan pembangunan baik pembangunan penyediaan air minum maupun sanitasi masyarakat?
- 3) Apa saja yang di bangun di desa tarokan ini?
- 4) Apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang diharapkan?
- 5) Apa saja dampak yang dihasilkan dari pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini? Baik dilihat dari dampak ekonomi, sosial, maupun fisik/lingkungan?

D. Badan Pengelola SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

- 1) Bagaimana badan pengelola amam ini bekerja?
- 2) Bagaimana sistem pembagian air yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan amsyarakat secara merata antar dusun?
- 3) Apakah anggota badan pengelola spam digilir atau tetap?

- 4) Apakah anggota BPSPAM di gaji? Berapa gaji yang diperoleh sebagai anggota BPSPAM? Apakah sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan?
- 5) Berapa iuran yang ditarik kepada masyarakat guna perawatan maupun pembayaran gaji anggota BPSPAM?
- 6) Apa saja hambatan yang terjadi dalam menjalankan tugas sebagai BPSPAM?
- 7) Apa perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya program Pamsimas ini?
- 8) Bagaimana dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program pamsimas?
- 9) Bagaimana manfaat yang dirasakan sebagai anggota BPSPAM sekaligus sebagai masyarakat pengguna?
- 10) masalah apa saja yang biasanya terjadi dalam perawatan sistem penyediaan air minum dan sanitasi mulai dari sumber hingga dapa penyaluran kepada masyarakat pengguna?

E. Perangkat Desa Tarokan yang terlibat dalam pelaksanaan maupun perencanaan program pamsimas

- 1) Bagaimana program ini berjalan?
- 2) Apa saja hambatan yang diterima dari mulai pengajuan, perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, maupun evaluasi?

F. Sekertariat Pamsimas Kabupaten Kediri

- 1) Apa sebenarnya peran dan fungsi sekertariat pamsimas yang ada di kabupaten Kediri?

- 2) Bagaimana sekretariat pamsimas menanggapi dan melihat pelaksanaan program pamsimas di desa taroakan?
- 3) Bagaimana prosedur pelaksanaan program pamsimas?
- 4) Apakah pelaksanaan program pamsimas di desa taroakan sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
- 5) Bagaimana program ini bisa dikatakan berhasil atau tidak?
- 6) Bagaimana cara penyaluran dana yang dilakukan dari pemerintah daerah sampai pada desa penerima program?

G. Masyarakat Pengguna dan guru pada SDN yang telah dibangun wastafel

- 1) Bagaimana perubahan yang dirasakan sebelum dan setelah adanya program pamsimas?
- 2) Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya program pamsimas?
- 3) Bagaimana dampak yang setelah adanya program pamsimas? Baik dilihat dari dampak fisik/lingkungan. Ekonomi, ataupun sosial masyarakat?
- 4) Bagaimana masyarakat ikut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan program?
- 5) Bagaimana kualitas dan debit air yang dihasilkan dari program pamsimas? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tau masih belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hai masyarakat?
- 6) Bagaimana kebiasaan hidup bersih dan sehat yang dilakukan masyarakat setelah adanya program pamsimas?
- 7) Bagaimana kebiasaan cuci tangan pakai sabun yang diajarkan bagi apra siswa SD?

- 8) Dari program pamsimas di desa tarokan apa saja sarana dan prasarana yang telah terbangun dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat?





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id Email : bakesbangpollinmas@kedirikab.go.id

Kediri, 20 Mei 2015

Nomor : 070/297/418.62/2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi

KEPADA
 YTH. SDR. 1. **KEPALA BAPPEDA KAB. KEDIRI**
 2. **KEPALA DINAS PU KAB. KEDIRI**
 3. **KA DINAS KESEHATAN KAB.KDR**
 4. **KADES TAROKAN KEC. TAROKAN**

REKOMENDASI

Menunjuk Surat Saudara Ketua Jurusan Administrasi Publik Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor : 208/UN10.3/PG/2015 perihal Pra Riset.

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpollinmas;
3. Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 070/1541/418.62/2012 Perihal Perubahan Proses Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **EKA TRI WAHYUNI**
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
 Kebangsaan : Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Unit / Wilayah Kerja Saudara dengan :

Judul : *Evaluasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) studi pada Ds. Tarokan Kab. Kediri.*

Penanggung jawab : **dr. Choirul Saleh, M.Si**
 Waktu : 4 (empat) bulan dimulai tanggal rekomendasi diterbitkan
 Lokasi : Bappeda, Dinas PU dan Ds. Tarokan Kec. Tarokan dan Dinas Kesehatan Kab. Kediri

Peserta : -

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. **KEPALA BAKESBANGPOL**
KABUPATEN KEDIRI
 Ka Bidang Kewaspadaan


IWAN AGUS WIJAYA, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19710808 199101 1 001

TEMBUSAN : Kepada YTH.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Kediri;
3. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Eka Tri Wahyuni
 Nomor Induk Mahasiswa : 115030613111002
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 18 September 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Desa.Tarokan, Kec.Tarokan, Kab.Kediri
 Fakultas/Minat : Ilmu Administrasi/ Perencanaan
 Pembangunan
 Email : ekatriwahyuni15@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SDN Tarokan 2 Kab. Kediri	1999 – 2005
2.	SMPN 2 Tarokan, Kab.Kediri	2005 – 2008
3.	SMAN 2 Nganjuk, Kab. Nganjuk	2008 -2011
4.	Fakultas Ilmu Administrasi Minat Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya Malang	2011 - 2015